

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA





PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar gambar, tabel, matrik dan kurva	ii
Sekapur sirih	iii
Kata Pengantar	iv
I. Pengantar Rencana Kontingensi.	1
a. Pandemik Covid-19.	2
b. Format Rencana Kontingensi Yang Disarankan BNPB.	3
II. Standar Sphere dan Penanganan Virus Corona.	6
III. Responsif Jender Dalam Penanganan Darurat Bencana	12
IV. Merumuskan Karakteristik Ancaman, Skenario Kejadian & Asumsi Dampak.	15
a. Karakteristik Ancaman Bencana.	15
1. Ancaman Utama	16
2. Ancaman Dampingan: Pandemik Covid-19.	17
1) Level Kewaspadaan	17
2) Kurva atau grafik epidemiologi Covid-19 di wilayah renkon.	18
3) Surat Keputusan Kepala Daerah Terkait Bencana Covid-19	19
4) Virologi, daur hidup, & rantai penularan SARS-Vov-2	19
3. Ancaman Ikutan	21
b. Skenario Kejadian Bencana.	25
c. Asumsi Dampak.	19
V Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana Di Masa Pandemik Covid-19	9. 34
a. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.	34
b. Tugas Pokok Komando Penanganan Kedaruratan Bencana.	37
Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana Berbasis Sistem c. Komando.	37
d. Administrasi, Keuangan & Logistik.	46
e. Komando, Kendali & Koordinasi.	47
VI. Lampiran-lampiran Pada Dokumen Rencana Kontingensi.	49

Daftar Gambar

1.	Sebaran Kejadian Bencana Alam Di Indonesia pada Periode 1 Januari – 6 Juni 2020	17
2.	Contoh level kewaspadaan di tingkat Kelurahan di Provinsi Jawa Barat	19
3.	Contoh grafik kasus harian nasional pada 29 Mei 2020	19
4.	Perkiraan Rt dan Laporan Kasus per-hari Provinsi DKI Jakarta, terlihat pada grafik ini Rt di DKI Jakarta pada angka 0,99	18
5.	Penerapan WPK di Sejumlah RW di DKI Jakarta	19
6.	Contoh grafik kasus harian di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 27 Mei 2020	19
7.	Contoh sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Kupang pada 26 Mei 2020 pukul 18:00 WITA	23
8.	Contoh-contoh Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Tanggap darurat Bencana Non-Alam Covid-19	19
9.	Tampilan virus Corona yang dibuat oleh CDC (Centre for Diseases Control – Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit)	20
10.	Mikroskop transmisi elektron yang menunjukkan duri dari SARS-CoV-2	20
11.	Siklus hidup SARS	23
12.	Struktur Organisasi Penanganan Kedaruratan Bencana	24
13.	Contoh Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana yang telah dikembangkan sesuai jenis bencana dan situasi/kondisi di wilayah	26
14.	Contoh Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana disaat pandemik Covid-19 yang telah dikembangkan sesuai jenis bencana dan situasi/kondisi di wilayah	36
15.	Contoh Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana disaat pandemik Covid-19 di tingkat kabupaten/kota yang telah dikembangkan sesuai jenis bencana dan situasi/kondisi di wilayah	36
Di	aftar Tabel, Matrik & Kurva	
1.	Level Kewaspadaan Menurut Pemerintah Jawa Barat	17
2.	Protokol Umum Pencegahan Penularan Covid-19 menurut Pemerintah Provinsi Jawa Barat	18
3.	contoh level kewaspadaan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	10

Sekapur Sirih

Salam tangguh,

Rangkaian bencana di Indonesia pada beberapa tahun terakhir, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Dibutuhkan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana, sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana dan PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kesiapsiagaan tanggap bencana membutuhkan Rencana Kontingensi Penanganan Kedaruratan Bencana yang baik, yang merupakan panduan tindakan yang akan dilakukan saat terjadi kedaruratan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat. Bahkan dalam UU 24/2007 seluruh pemerintah daerah dihimbau untuk menyiapkan dokumen rencana kontingensi sebagai antisipasi ancaman bencana di daerahnya masing-masing. Rencana kontingensi ini disusun berdasarkan pendekatan partisipatif seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dunia pendidikan, LSM dan dunia usaha yang seyogyanya ditinjau lagi secara berkala untuk menyesuaikan dengan beberapa kondisi yang mungkin saja sudah berubah.

Sejalan dengan mandat kemanusiaan dan komitmen pada penguatan kapasitas lokal penanganan kebencanaan, Yayasan CARE Peduli menyelenggarakan pelatihan "Penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Kedaruratan Bencana" yang diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah dan beberapa daerah lain serta berbagai LSM dan organisasi. Pelatihan ini dilakukan pada saat COVID-19 masih membayangi Indonesia dan kondisi tersebut menjadi aspek tambahan penting rencana kontijensi yaitu strategi penanggulangan bencana di tengah pandemi.

Yayasan CARE Peduli menerbitkan "Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi Penanganan Kedaruratan Bencana" ini yang diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kontingensi di daerahnya atau organisasinya.

Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi khususnya Sdr. Ujang D Lasmana, yang juga menjadi fasilitator utama pelatihan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita

Jakarta, 13 Agustus 2020

Bonaria Siahaan





Rencana Kontingensi sebagai pedoman tindakan yang akan dilakukan di saat terjadi kedaruratan bencana adalah dokumen yang harus dimiliki setiap daerah sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Sesuai dengan himbauan Presiden RI, rencana kontingensi adalah dokumen yang wajib dimiliki daerah yang memiliki ancaman bencana. Sehingga Pemerintah Daerah harus menyusunnya sesuai dengan ancaman bencana yang ada di wilayahnya.

Penyusunan rencana kontingensi haruslah disusun berbasiskan pada pendektana partisipatif, sehingga dokumen tersebut adapat digunakan sebagai panduan oleh para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di wilayah yang bersangkutan.

Berangkat dari hal tersebut dan pengalaman penulis dalam memfasilitasi penyusanan rencana kontingensi di beberapa daerah di Indonesia, maka disusunlah buku ini sebagai salah satu sumber bacaan saat penyususnan rencana kontingensi dilaksanakan. Seperti niat awalnya, buku ini bukanlah buku utama dalam penyusunan rencana kontingensi bagi yang berkepentingan, namun hanya sebatas sebagai pendamping atau pegangan fasilitator saja.

Buku catatan ini kami buat agar dapat diakses dengan mudah oleh rekan-rekan fasilitator sehingga siapapun dapat menggunakan buku ini sebagai pegangan fasilitator.

Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para rekan fasilitator. Aamiin.

Pamulang, 1 Juni 2020

Ujang Dede Lasmana



Rencana kontingensi merupakan sebuah rencana tindakan sebuah lembaga kemanusiaan atau pemerintah untuk menangani keadaan darurat bencana yang terproyeksikan mungkin terjadi dimasa depan di wilayahnya. Sebuah rencana kontingensi mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia di suatu wilayah, termasuk prosedur komunikasi, koordinasi dan juga logistik dan tekhnik menanggapi keadaan darurat bencana yang dimiliki.

Rencana kontingensi banyak digunakan di kalangan militer¹, perusahaan² dan lembaga kemanusiaan³ dalam upaya institusi menanggapi suatu keadaan darurat yang terjadi.

Sebuah rencana kontingensi diharapkan mampu dioperasikan tepat waktu dan menjadikan operasi kemanusiaan tanggap darurat bencana berjalan dan efektif serta dapat menjadi rujukan dalam penyusunan rencana operasi.⁴

Presiden RI mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana kontingensi penanganan darurat bencana, instruksi ini akan diperkuat sebagai payung hukum melalui sebuah Instruksi Presiden RI.

Dalam hirarki penanggulangan bencana di Indonesia, rencana kontingensi merupakan turunan dari Rencana penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), di mana rencana kontingensi merupakan sebuah rencana operasional yang memuat tujuan

- ${\bf 1} \quad {\rm Di\,lingkungan\,militer\,rencana\,kontingensi\,disebut\,dengan\,istilah\,rencana\,operasi.}$
- 2 Di lingkungan perusahaan rencana kontingensi bertujuan agar perusahaan masih terus bisa beroperasi dan mampu bertahan dimasa darurat, terkadang juga disandingkan dengan Bussiness Continuity Plan.
- 3 Di lingkungan lembaga kemanusiaan, secara umum rencana kontingensi bertujuan agar penanganan darurat bencana efisien, efektif dan sesuai dengan standar-standar kemanusiaan yang ada.
- 4 Tujuan Rencana Kontingensi menurut BNPB adalah:
 - a. Mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario, tujuan, kebijakan dan strategi yang telah disepakati, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta memuat tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama oleh berbagai pemangku kepentingan.
 - b. Membantu mengkoordinasikan lembaga, organisasi, dan perorangan untuk memberikan respon yang cepat, tepat, terpadu, efektif dan efisien, terpadu dan akuntablel.
 - c. Memastik[']an kemampuan sumberdaya yang tersedia dan menciptakan mekanisme untuk pengambilan keputusan yang cepat yang mampu mempersingkat respon bencana dan yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa.
 - d. 🗎 Menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjad
 - e. Menggerakkan sumberdaya secara efektif saat penanganan darurat terjadi.



dan pedoman untuk perencanaan taktis yang berisikan tugas dan tanggung jawab dari berbagai pihak yang terintegrasi atau terpadu dalam sebuah sistem komando penanganan kedaruratan bencana.

Sebuah rencana kontingensi disusun hanya untuk satu jenis ancaman utama saja⁵ namun tetap memperhatikan dampak ikutan atau ancaman ikutan (ancaman dampingan⁶ dan ancaman ikutan).

Rencana kontingensi idealnya disusun sebelum kejadian bencana, yaitu disaat ancaman bencana "terlihat" atau memang terdapat potensi besar ancaman bencana tertentu.

Penyusunan rencana kontingensi disusun secara partisipatif di antara para pemangku kepentingan atau lembaga/organisasi/institusi yang akan "turun" dalam penanganan kedaruratan bencana, dengan kata lain sangat tidak ideal bila rencana kontingensi hanya disusun oleh satu lembaga saja walaupun lembaga itu adalah penanggung jawab utama penanggulangan bencana (BNPB atau BPBD).

Rencana kontingensi tingkat kabupaten/kota harus berlandaskan pada sumberdaya wilayah yang tersedia dengan tetap mempertimbangkan tata cara permintaan bantuan kepada Provinsi/Pusat atau wilayah tetangga.

a. Pandemik Covid-197

Pada masa pandemik Covid-19 saat ini, rencana kontingensi harus mempertimbang ancaman Covid-19 ini sebagai ancaman dampingan. Ancaman dampingan merupakan ancaman kedaruratan bencana yang harus masuk dalam pertimbangan seperti anak kembar dengan ancaman utamanya.

Hal ini karena penularan Covid-19 akan mudah terjadi saat terjadi evakuasi dan tinggal di penampungan bagi para penyintas dan juga personil penanganan bencana.

⁵ Disisi lain, bila terdapat ancaman bencana yang saling terkait maka bisa saja satu rencana kontingensi memuat dua ancaman utama, misalnya gempa dan tsunami.

⁶ Istilah ancaman dampingan bukan merupakan istilah resmi namun hanya istilah yang digunakan oleh penulis untuk keperluan panduan penyusunan rencana kontingensi di masa pandemik Covid-19. Hal ini karena penanganan kedaruratan bencana di masa pandemik Covid-19 wajib mengikuti protokol-protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat.

⁷ Walaupun nanti Pandemik sudah selesai namun ancaman Covid-19 akan terus terjadi selama vaksin belum tersedia dan merata pada populasi.

b. Format Rencana Kontingensi Yang Disarankan Oleh BNPB

Format rencana kontingensi yang disarankan oleh BNPB⁸ adalah sebagai berikut:⁹

Halaman Judul

Daftar Isi

Daftar Tahel

Daftar Gambar

Daftar Istilah/Singkatan

BABISITUASI

1.1. Karakteristik Bahaya Bencana

1.2. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

BABII TUGAS POKOK

BAB III PELAKSANAAN

- 3.1 Konsep Operasi
- 3.2 Fungsi Tugas-tugas
- 3.3. Instruksi Koordinasi

BAB IV ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

- 4.1 Administrasi
- 4.2 Logistik

BAB V KOMANDO, KENDALI, DAN KOMUNIKASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran-A: Struktur Koordinasi Dengan

Pos Pendamping

Lampiran-B: Susunan Tugas

Lampiran-C: Jaring Komunikasi

Lampiran-D: Peta-Peta

Lampiran-E: Sumberdaya yang digunakan

Lampiran-F: Prosedur Tetap/SOP

Lampiran-G: Lembar Komitmen

Lampiran-H: Berita Acara Penyusunan

Renkon

Kebutuhan Dasar Dalam Penyusunan Rencana Kontingensi

Data, Informasi, Metode Analisis, dan Narasumber

Dalam penyusunan rencana kontingensi yang berbasiskan data dan analisis maka diperlukan beberapa data, informasi dan metode-metode analisis dalam pengambilan keputusan yang umum dan bisa dipertanggungjawabkan. Analisa risiko, kebutuhan, kesetaraan jender, dll merupakan contoh yang harus dilakukan atau dicarikan sumber resminya (misalnya IRBI, RPB, RPKB, dll).

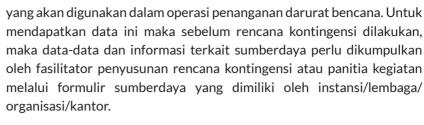
Demikian pula diperlukannya data sumberdaya yang dimiliki oleh instansi/lembaga/organisasi/kantor

⁸ Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana (Edisi Ke-empat). Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 2019.

⁹ Dengan mengikuti format ini, maka penulis akan memfasilitasi pembaca untuk membuat rencana kontingensi sesuai format BNPB.







Untuk menjamin mutu rencana kontingensi maka perlu menghadirkan narasumber dari instansi/ lembaga/organisasi/kantor yang sesuai dengan topik rencana kontingensi, misalnya:









Peta-peta, menurut pengalaman penulis, dapat bekerjasama dengan Bappeda, ESDM, Dinas Keseha-tan, BPBD dan/atau Lembaga Kemanusiaan (misalnya PMI, CARE, ACT, Lembaga Kemanusiaan setempat, forum PRB, dll.).



Peserta

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan amanat (visi & misi), sumberdaya dan kepakaran instansi/lembaga/organisasi/kantor serta dapat diaplikasikan disaat kedaruratan bencana terjadi, maka penyusunan ini dilakukan secara partisipatif (artinya, melibatkan semua









komponen yang akan dan bersedia turun saat terjadi kedaruratan bencana dan juga kepakaran). Sehingga panitia dan fasilitator harus memastikan keterwakilan instansi/ lembaga/organisasi/kantor tersebut.

Berdasarkan pengalaman dan juga saran dari pedoman BNPB melalui buku pedoman penyusunan renkon dan juga konsep penanggulangan bencana pentaheliks¹⁰ maka peserta yang minimal diikut sertakan diantaranya adalah:

- ✓ Bappeda.
- ✓ Dinas Kesehatan.
- ✓ Dinas PUPR.
- ✓ Dinas Sosial.
- ✓ Dinas Ketahanan Pangan.
- ✓ Dinas Pemadam Kebakaran.
- ✓ Dinas Pendidikan.
- ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- ✓ TNI.
- ✓ Polri.
- ✓ Kecamatan/Distrik/Nagari dan Kelurahan/ Desa yang diasumsikan terdampak.

- ✓ RS
- ✓ Basarnas: Kantor SAR atau Pos SAR yang ada di wilayah.
- ✓ Perwakilan Organisasi Masyarakat.
- ✓ PMI.
- ✓ Asosiasi RS.
- ✓ Asosiasi Hotel dan Restoran.
- ✓ Asosiasi Pedagang,
- ✓ Perguruan Tinggi.
- ✓ Media.
- ✓ DII.

Peserta tersebut sudah tentu dapat disesuaikan kepada anggaran dan nomenklatur berdasarkan pada Organisasi dan Tatalaksana pada pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Fasilitator

Untuk menjamin penyusunan rencana kontingensi yang tepat waktu dan bermutu, maka diperlukan fasilitator dan ko-fasilitator yang memiliki kriteria dasar sebagai berikut:

- 1. Memiliki keterampilan memfasilitasi yang dibuktikan dengan sertifikat fasilitator dan pernah mengikuti pelatihan penyusunan rencana kontingensi.
- 2. Memiliki pengalaman bekerja dalam ranah pra-bencana dan respon bencana.
- 3. Bertanggungjawab terhadap hasil kerja.

- 1. Pemerintah.
- 2. Masyarakat.
- 3. Dunia usaha.
- 4. Perguruan tinggi.
- 5. Media.

¹⁰ Pentaheliks dalam PB di Indonesia adalah keterlibatan lima unsur dalam upaya penanggulangan bencana, ke-lima unsur tersebut adalah:



Standar Sphere dan Penanganan Virus Corona. 11 & 12

Virus Corona menyebar luas. Bagaimana individu-individu, masyarakat dan para pelaku kemanusiaan menangani secara tepat wabah Covid-19?

Bagaimana Buku Pegangan Sphere memberikan pe-tunjuk penanganan yang kita lakukan?

Mari berbagi pembelajaran

Sphere mengumpulkan dan mendiseminasikan praktik dan bukti dalam penanganan virus Corona. Jika Anda memiliki komentar terkait dokumen ini atau memiliki praktik-praktik baik untuk dibagikan. silahkan hubungi handbook@spherestandards.org.

Struktur

Dokumen ini memiliki dua bagian:

A. Bagian pertama memuat prinsip-prinsip mendasar yang sangat penting untuk sebuah keberhasilan, intervensi menyeluruh.

B. Bagian kedua memuat kaitan standar-standar dan petunjuk dalam Buku Pegangan Sphere sektor WASH (Suplai Air, Sanitasi dan Kebersihan) dan Sektor Kesehatan.

¹¹ Tentang virus Corona COVID-19: Coronavirus adalah salah satu keluarga besar virus. Virus Corona yang paling baru ditemukan, pertama kali diidentifikasi di wilayah Hubei (Cina) pada Desember 2019, menyebabkan penyakit COVID-19. Pada kasus yang parah, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan kematian. Sekitar 81.000 kasus dilaporkan pada tingkat global per 26 Februari 2020. (Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia - WHO).

¹² Diambil dari https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Coronavirus-guidance-2020_bahasa.pdf



A. Pendekatan Menyeluruh

Sphere memberikan sebuah pendekatan menyeluruh, berpusat masyarakat untuk kerja kemanusiaan, dengan tiga bagian fondasi dasar Piagam Kemanusiaan, Prinsip

Perlindungan dan Standar Inti Kemanusiaan yang mendukung empat bagian sektor teknis. Terkait penanganan Virus Corona, terdapat tiga faktor penting yang saling terkait: Pertama, masyarakat harus dipandang sebagai manusia, bukan hanya kasusnya. Martabat Manusia adalah nilai utama yang terangkai disepanjang Buku Pegangan Sphere. Kedua, keterlibatan masyarakat adalah sangat penting. Dan ketiga, memfokuskan pada upaya pencegahan penyebaran Virus Corona seharusnya tidak membuat kita melupakan kebutuhankebutuhan lain masyarakat terdampak. termasuk kebutuhan medis jangka panjang masvarakat lebih luas.

1. Martabat Manusia

Ketika Anda menggunakan Buku Pegangan Sphere, harap lakukan dalam semangat Piagam Kemanusiaan. Masyarakat memiliki hak untuk hidup bermartabat. Ingat selalu hal paling mendasar dari Prinsip Perlindungan dan Standar Inti Kemanusiaan: Masyarakat wajib selalu dilibatkan dalam penanganan.

Sebuah penanganan virus Corona hanya akan efektif jika semua masyarakat sasaran dapat dipilih, dites dan - jika ditemukan sakit - dirawat. Hal ini mengapa Anda akan butuh untuk mengidentifikasi masya-rakat yang mungkin bimbang mengajukan diri untuk perawatan. Bagi mereka yang hidup dengan kondisi terstigma atau karena mereka takut terstigma terjangkit virus Corona maka dapat menyebabkan mereka menyembunyikan sakitnya untuk menghindari diskriminasi. Hal ini mungkin mencegah masyarakat segera mencari layanan kesehatan

dan menghalangi mereka mengadopsi perilaku sehat. Karena itu penting untuk menyediakan pesan dan perawatan yang mendukung. Dalam hal ini, Prinsip-prinsip Perlindungan 1 dan 2 secara langsung relevan, karena mereka menguraikan tiga hak yang dijabarkan dalam Piagam Kemanusiaan: hak untuk martabat, perlindungan dan bantuan:

- Prinsip Perlindungan 1: Tingkatkan keselamatan, martabat, dan hak-hak orang dan hindari keterpaparan mereka untuk bahaya lebih lanjut, membahas risiko perlindungan, pentingnya analisis konteks, penanganan informasi sensitif dan mendukung mekanisme perlindungan masyarakat (di mana mereka tidak bertentangan dengan tujuan penyehatan masyarakat).
- Prinsip Perlindungan 2: Akses ke bantuan yang tidak memihak sesuai kebutuhan dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menyatakan hak untuk menerima bantuan kemanusiaan, salah satu dari tiga hak dalam Sphere yang dinyatakan dalam Piagam Kemanusiaan.

2. Pelibatan Masyarakat

Kebersihan yang buruk merupakan faktor penting dalam penyebaran penyakit menular. Coronavirus disebarkan oleh tetesan; Oleh

> SEBUAH PENANGANAN VIRUS CORONA HANYA AKAN EFEKTIF JIKA SEMUA MASYARAKAT SASARAN DAPAT DIPILIH, DITES DAN JIKA DITEMUKAN SAKIT DIRAWAT.

karena itu, kebersihan tangan adalah elemen utama dalam mencegah penyebarannya. Oleh karena itu, promosi kebersihan dengan fokus pada cuci tangan sangat penting tetapi hanya dapat berfungsi jika masyarakat terlibat penuh. Ini melibatkan membangun kepercayaan dan saling pengertian dengan melibatkan masyarakat dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Promosi kebersihan wajib mencakup fokus utama pada mencuci tangan secara teratur dan tindakan keselamatan lainnya yang spesifik untuk respons khusus ini, misalnya menjaga jarak Anda dari orang lain.

Untuk mencuci tangan, lihat: Standar Promosi Kebersihan 1.1 (Promosi kebersihan) dan 1.2 (Peralatan Kebersihan).

Persepsi dan kepercayaan masyarakat yang ada dapat mendukung atau menghambat respons, sehingga penting untuk memahami dan mengatasinya. Beberapa norma sosial mungkin perlu dimodifikasi untuk mencegah penularan penyakit. Misalnya, Anda mungkin perlu bekerja dengan komunitas untuk menemukan bentuk salam alternatif untuk menggantikan jabat tangan, atau cara penanganan daging dan hewan di pasar. Juga mengidentifikasi dan mendorong langkahlangkah pencegahan dan pengobatan penyakit spesifik COVID-19 yang dilakukan di komunitas yang terkena dampak. Jika petugas penyuluhan masyarakat secara aktif pergi ke lapangan untuk menemukan kasus atau melakukan tugas terkait, mereka harus dilatih untuk melakukan halnya (lihat juga Standar Kesehatan 2.1.4, di bawah).

Demikian pula, keterlibatan masyarakat yang efektif dapat mengidentifikasi dan mengatasi rumor dan informasi yang salah. Ini menyebar sangat cepat di perkotaan. Di pusat perkotaan/urban, sangat penting untuk mengidentifikasi dan melibatkan masyarakat dan

KETERLIBATAN MASYARAKAT
YANG EFEKTIF DAPAT
MENGIDENTIFIKASI DAN
MENGATASI RUMOR DAN
INFORMASI YANG SALAH. INI
MENYEBAR SANGAT CEPAT DI
PERKOTAAN.

pemangku kepentingan, misalnya sekolah, klub, kelompok perempuan atau pengemudi taksi. Ruang publik, media, dan teknologi dapat membantu. Gunakan teknologi untuk segera memberikan informasi akurat tentang layanan kesehatan dan layanan lainnya. Penyedia layanan kesehatan sekunder dan tersier sering lebih aktif di kota-kota, sehingga meningkatkan kapasitas penyedia layanan tersebut untuk memberikan layanan kesehatan primer. Libatkan mereka dalam sistem peringatan dini dan penanganan untuk penyakit menular dan tingkatkan kapasitas mereka untuk memberikan layanan sehari-hari mereka.

- Untuk keterlibatan masyarakat, lihat: Pengantar bagian sektor WASH dan Pengantar standar WASH 6: WASH dalam wabah penyakit dan pengaturan layanan kesehatan.
- Untuk panduan kota, lihat: Apa itu Sphere? Bagian tentang pengaturan kota/urban dan Pengantar bagian sektor WASH serta Pengantar bagian sektor Kesehatan.
- 3. Kebutuhan manusia dari komunitas yang terkena dampak dan kebutuhan medis lebih luas

Untuk orang-orang yang terkena dampak, penanganan psikososial dan perawatan paliatif (stadium akhir) berkontribusi sangat penting terhadap perasaan diri, keberadaan mereka dan penyembuhan emosional, lihat: Standar Kesehatan 2.6 dan 2.7.

Semua standar kesehatan lain dari Buku Pegangan Sphere dilanjutkan agar relevan juga. Ini mencakup kesehatan ibu dan reproduksi. penyakit tidak menular, cedera, perawatan kesehatan anak dan masalah lainnya. Mereka harus dilanjutkan, baik untuk orang-orang yang terkena dampak dan kedepannya. Pada tahun 2014 di Afrika Barat, banyak staf kesehatan dialihkan dan dikerahkan ke respon Ebola, yang membuat layanan lain dalam perawatan kesehatan tidak didukung. Ini berarti lebih banyak kematian ibu, imunisasi anak yang tidak mencukupi yang mengarah pada wabah penyakit pada tahun berikutnya dan tidak ada perawatan berkelanjutan untuk pasien dengan penyakit tidak menular. Jumlah kematian dari pusat-pusat kesehatan yang ditinggalkan dan daerah-daerah signifikan.



B. Penanganan Medis

Terdapat panduan dalam bagian sektor WASH dan Kesehatan mengenai penanganan medis terhadap virus Corona.

1. Bagian Sektor WASH

Silakan gunakan panduan di bagian Promosi Kebersihan, termasuk Aksi Kunci, Indikator Kunci dan Catatan panduan.

Standar 1.1 (Promosi Kebersihan) mensyaratkan bahwa masyarakat sadar akan risiko-risiko utama kesehatan masyarakat yang terkait dengan air, sanitasi dan kebersihan, dan dapat mengadopsi



langkah-langkah individu, rumah tangga dan masya-rakat untuk menguranginya.

- Standar 1.2 (Alat Kebersihan) mensyaratkan bahwa peralatan yang sesuai untuk mendukung kebersihan, kesehatan, martabat dan kesejahteraan tersedia dan digunakan oleh masyarakat terdampak.
- Standar WASH 6 (WASH dalam pengaturan layanan kesehatan) menyata-kan: Semua pengaturan layanan kesehatan mempertahankan standar minimum WASH pencegahan dan pengendalian infeksi, ter-masuk dalam wabah penyakit. Standar ini langsung berlaku untuk respons COVID-19 dan harus digunakan secara menyeluruh. Ini sekali lagi menegaskan promosi kebersihan dan bekerjasama dengan masyarakat. Diag-ram di samping ini memberikan gambaran tindakan kunci WASH berbasis komunitas selama wabah penyakit. Intervensi spesifik COVID-19 harus diambil misal berkaitan dengan kebersihan tangan.
- Untuk aksi-aksi kesehatan terkait, lihat

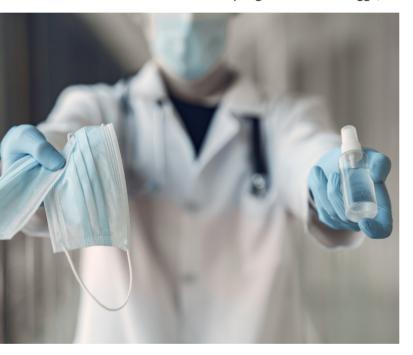
Standar penyakit menular 2.1.1 hingga 2.1.2 (di bawah).

2. Bagian Sektor Kesehatan

Sektor Kesehatan memiliki dua bagian: i) Sistem kesehatan dan ii) Layanan Kesehatan Pokok.

i) Sistem kesehatan

Sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik dapat menangani semua kebutuhan perawatan kesehatan dalam krisis sehingga meskipun selama terjadi wabah penyakit berskala besar, kegiatan perawatan kesehatan lainnya dapat diterus berjalan. Sistem kesehatan mencakup semua tingkatan, dari nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas ke penge-lola rumah tangga, militer dan sektor swasta. Penting untuk me-



mahami dampak krisis terhadap sistem kesehatan untuk menentukan prioritas bagi respons kemanusiaan.

Bagian Sistem Kesehatan dengan kelima standarnya adalah relevan secara keseluruhan. Perhatian khusus harus diberikan pada:

- ► Standar sistem kesehatan 1.1 (Pemberian layanan kesehatan) mencakup Catatan panduan tentang ketersediaan; penerimaan; keterjangkauan; perawatan tingkat masyarakat; Fasilitas yang layak dan aman; Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPC-Infection Preven-tion and Control).
- ► Standar sistem kesehatan 1.2 (tenaga kesehatan) termasuk catatan

panduan tentang kualitas, menegaskan pentingnya melatih tenaga kerja secara tepat untuk penanganan tertentu.

- Standar sistem kesehatan 1.3 (Akses ke obat-obatan pokok dan peralatan medis).
- Standar sistem kesehatan 1.5 (Informasi kesehatan) memiliki bagian tentang pengawasan penyakit. Hal ini terkait dengan standar penyakit menular 2.1.2 (pengawasan, deteksi wabah, dan penanganan awal).
- ii) Layanan kesehatan pokok Bagian tentang penyakit menular

Keempat standar dalam bagian Penyakit menular (Standar kesehatan 2.1.1 - 2.1.4)

sangat relevan. Mereka mencakup Pencegahan (2.1.1); pengawasan, deteksi wabah, dan penanganan awal (2.1.2); Diagnosis dan manajemen kasus (2.1.3); dan kesiapsiagaan dan respons terhadap wabah penyakit (2.1.4). Perhatian khusus harus diberikan pada:

- Standar 2.1.1 (Pencegahan): Masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan dan informasi untuk mencegah penyakit menular. Standar ini menghubungkan kembali ke keterlibatan masyarakat. Aksi Kunci 2 mengatasi ketakutan dan rumor, yang menghubungkan kembali dengan keterlibatan dan pemahaman masyarakat. Sama pentingnya adalah Aksi Kunci 4 dan 5 yang mencakup tindakan pencegahan dan pengendalian. Silakan baca Catatan Panduan tentang penilaian risiko, langkah-langkah pencegahan antarsektor, promosi kesehatan dan vaksinasi (jika dikembangkan, saat ini tidak ada vaksin yang disetujui).
- ▶ Standar 2.1.2 (Pengawasan, deteksi wabah, dan penanganan dini): Sistem pengawasan dan pelaporan menyediakan deteksi dini wabah penyakit dan penanganan dini. Standar ini harus dilihat secara keseluruhan. Ini terkait dengan standar sistem kesehatan 1.5 (informasi kesehatan, lihat di atas)

- Standar 2.1.3 (Diagnosis dan manajemen perawatan). Aksi kunci sangat penting. Mereka termasuk pesan dan komunikasi risiko yang jelas (Aksi Kunci 1), menggunakan standar protokol manajemen kasus (Aksi Kunci 2) dan memiliki kapasitas laboratorium dan diagnostik yang memadai (Aksi Kunci 3). Memastikan bahwa perawatan untuk orang yang menerima perawatan jangka panjang tidak terganggu (Aksi Kunci 4) juga ditegaskan. Catatan Panduan penting untuk standar ini adalah: Protokol perawatan; Infeksi pernapasan akut (tetapi tidak diperlukan antibiotik untuk infeksi virus kecuali infeksi bakteri sekunder); dan pengujian laboratorium.
- Penanganan Wabah Penyakit). Aksi-aksi kunci mencakup kesiapsiagaan dan rencana penanganan (Aksi Kunci 1), langkah-langkah pengendalian (Aksi Kunci 2), kapasitas logistik dan respons (Aksi Kunci 3) dan Koordinasi (Aksi Kunci 4). Catatan Panduan mencakup kesiapsiagaan dan rencana penanganan wabah penyakit; Kontrol wabah, tingkat fatalitas kasus (masih diperkirakan 2% untuk COVID-19); dan Perawatan anak-anak.

Sphere

Route de Ferney, 150 | Geneva | Switzerland info@spherestandards.org spherestandards.org

Voluntary translated by/Diterjemahkan oleh: Ary Ananta - Sphere Trainer and Emergency Response Manager Arbeiter Samariter Bund for Indonesia and the Philippines



a. Upaya Pengarusutamaan Jender Dalam Penanganan Darurat Bencana di Indonesia

Upaya pengarusutamaan jender dalam penanganan darurat bencana sudah dilakukan sejak berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan terinstutusional sejak BNPB mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 13 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penang-gulangan Bencana¹³. Sebelumnya, sektor-sektor lain sudah menginstitusionalkan kesetaraan jender ini dalam berbagai bidang pembangunan di Indonesia seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan, pariwisata, komunikasi, dll.

Tujuan dari Perka¹⁴ ini adalah:

- 1. Melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap komponen penyelenggaraan PB.
- 2. Mendorong pengarusutamaan gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam PB.
- 3. Mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam PB.



Pengarusutamaan jender dalam penanggulangan bencana dan juga penanganan darurat bencana merujuk pada empat indikator¹⁵, yaitu:

- 1. Akses.
- 2. Partisipasi.
- 3. Kontrol terhadap sumberdaya dan pengambilan keputusan.
- 4. Manfaat dari kebijakan dan program.

Responsif jender¹⁶ dalam penanggulangan bencana yang penting difahami dalam rencana kontingensi didefinisikan sebagai perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan jender (dalam hal ini penanggulangan bencana).

Perencanaan responsif jender¹⁷ dalam Perka ini didefinisikan sebagai perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan jender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (dalam penanggulangan bencana) yang dilaksanakan melalui:

- Pelibatan perempuan dan laki-laki secara aktif dalam menyusun rencana tanggap darurat.
- Pemastian adanya perwakilan yang seim-bang antara laki-laki dan perempuan dalam tim kaji cepat.
- Pemprioritasan kelompok rentan untuk menghindari kekerasan berbasis gender.

Isu Responsif Jender Dalam Dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Kedaruratan Bencana.

Rencana kontingensi yang merupakan sebuah perencanaan tindak dan kebijakan saat penanganan

¹⁵ PERKA BNPB NO. 13/2014 PASAL 4.

¹⁶ Perka BNPB No. 13/2014 Pasal 1; angka 6.

¹⁷ Perka BNPB No. 13/2014 Pasal 1; angka 7.

darurat bencana perlu disemangati oleh semangat kesetaraan jender (pengarusutamaan jender) dan hal tersebut harus dipastikan ada dalam rencana kontingensi. Sehingga pelibatan para pemangku kepentingan kesetaraan jender perlu dilibatkan pula.

Pengarusutamaan jender dalam penyusunan rencana kontingensi dilakukan berdasarkan analisis jender dalam menggunakan:

- 1. Data terpilah.
- 2. Metode alur kerja analisis jender (*Gender Analisys Pathway*) atau metode lain yang sesuai.

Kelompok kerja pengarusutamaan jender¹⁹ di wilayah yang menjadi lokus dalam rencana kontingensi haruslah dilibatkan dan terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi, sehingga dapat memberikan masukan dan pengawalan yang tepat dalam setiap komponen rencana kontingensi yang sedang dibuat.

Pengarusutamaan jender dalam rencana kontingensi harus masuk dalam setiap bagian (Bab dan Sub-Bab) rencana kontingensi, mulai dari karakteristik ancaman bencana sampai pada lampiran-lampiran.

b. Dokumen Rencana Kontingensi Berbasis Kesetaraan Jender

Untuk menjadikan rencana kontingensi yang dibuat memperhatikan aspek-aspek kesetaraan jender, maka perlu dilakukan analisa kesetaraan jender (misalnya menggunakan metode AKAJ) yang hasil dari analisis tersebut dijadikan masukan dalam setiap bagian dalam rencana kontingensi yang dibuat sesuai dengan temanya.

Pada setiap komponen rencana kontingensi (pernya-taan-pernyataan dalam rencana kontingensi) harus dipastikan terdapat pernyataan terkait kesetaraan jender dan dalam Lempiran dapat dimasukkan kon-sep-konsep dasar atau SOP-SOP terkait kesetaraan jender sehingga dapat menjadi acuan aksi saat tang-gap darurat bencana.

¹⁸ Perka BNPB No. 13/2014 Pasal 5; angka (3).

¹⁹ Perka BNPB No. 13/2014 Pasal 8; angka 1.



a. Karakteristik Ancaman Bencana.

Karakteristik Ancaman Bencana dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari BAB I: SITUASI dan merupakan Sub-Bab 1.1. Karakteristik Ancaman Bencana

Karakteristik ancaman bencana dalam rencana kontingensi umumnya memuat ancaman utama dan ancaman ikutan, namun dimasa pandemik Covid-19 ini terdapat suatu ancaman yang harus dimasukkan yaitu ancaman dampingan²⁰. Ancaman dampingan ini adalah ancaman penyebarluasan/penularan Covid-19 di wilayah terjadinya kadaruratan atau bencana, selain karena sedang pandemik juga karena mudahnya penularan penyakit ini antar manusia.

Perlu diingat bahwa setiap ancaman bencana memiliki karakteristik yang khas dan berbeda satu sama lain. Karakteristik ini dapat dipengaruhi oleh kondisi:

- 1) Geografis,
- 2) Geologi,
- 3) Lingkungan,
- 4) Kependudukan,
- 5) Ekonomi,
- 6) Sejarah kejadian bencana.

Pada masa pandemik Covid-19 ini, Indonesia tetap mengalami bencana sebanyak 1.570 kejadian sejak 1

²⁰ Istilah ancaman dampingan ini dipilih penulis sebagi upaya untuk mengarusutamakan pencegahan penyebarluasan/penyebaran Covid-19 di wilayah darurat atau bencana. Istilah ini belum menjadi istilah resmi.

Januari sampai 3 Juli 2020 dengan angka kematian 199 orang, 279 orang terluka, 2.334.002 orang menderita dan mengungsi.



Gambar 1 Sebaran Kejadian Bencana Alam Di Indonesia pada Periode 1 Januari – 3 Juli 2020.

Sehingga kesiapsiagaan bencana harus tetap dilakukan dan bahkan disarankan untuk menyusun rencana kontingensi penanganan darurat bencana di masa pandemik Covid-19.

i. Ancaman Utama

Ancaman utama merupakan satu ancaman bencana yang diproyeksikan akan terjadi di suatu wilayah dan mengancam kehidupan dan sumber penghidupan serta dapat pula memicu ancaman bencana lainnya.

Dalam suatu wilayah dapat saja terdiri dari beberapa ancaman utama. Ancaman-ancaman utama ini harus diidentifikasi dan dibuatkan prioritas penyusunan rencana kontigensinya.

Ancaman utama pada rencana kontingensi yang dibuat dapat berasal dari beberapa kondisi berikut atau bisapula merupakan gabungan diantaranya:

1) Merupakan ancaman bencana yang disepakati bersama berdasarkan matrik analisa risiko.

- Ancaman utama bisa pula bersumber pada hasil kajian risiko wilayah. Jadi sangat disarankan untuk melihat kajian risiko bencana di wilayah penyusunan rencana kontingensi. Bila belum memiliki dokumen kajian risiko, maka gunakan matrik analisa risiko.
- Instruksi atau perintah kepala daerah untuk segera menyusun suatu rencana konti-ngensi.
- 4) Program dari Pusat (BNPB), Provinsi atau bahkan lembaga kemanusiaan yang kebetulan sedang berkhidmat di wilayah.

Ancaman utama ini dapat diikuti dengan adanya ancaman dampingan dan ancaman ikutan (second-dary hazard(s)).

ii. Ancaman Dampingan: Pandemik Covid-19.

Ancaman dampingan menurut penulis adalah suatu atau beberapa ancaman yang karena berbagai sebab harus menjadi perhatian utama disaat merancang rencana kontingensi karena ancaman dampingan tersebut bisa jadi sedang terjadi, diantaranya adalah adaya suatu wabah atau pendemik penyakit menular.

Penyakit menular yang saat ini tengah terjadi adalah Covid-19 (dengan status pandemik), sehingga merupakan ancaman bencana dampingan terhadap ancaman bencana utama pada rencana kontingensi yang kita buat. Sehingga pada rencana kontingensi tersebut harus memasukkan ancaman dampingan ini.

Penyebaran penyakit Covid-19 akibat virus SARS-Cov-2 menjadi ancaman bagi penyintas dan juga bagi penolong pertama (sukarelawan maupun pekerja kemanusiaan) baik di wilayah bencana maupun di wilayah tempat penampungan penyintas bencana dan juga di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga pada saat

penyusunan rencana kontingensi dilakukan, aspek pencegahan penularan penyakit Covid-19 wajib menjadi perhatian utama.

Unsur dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 disaat terjadinya bencana yang harus dijadikan perhatian adalah:

1. Level Kewaspadaan.

Identifikasi status zona wilayah pandemik pada wilayah yang kita cakupkan dalam rencana konti-ngensi akan mempengaruhi tingkatan risiko dan juga mempengaruhi protokol-protokol tindakan dalam upaya pencegahan penyebarluasan/penula-ran Covid-19. Status ini dapat diperoleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di berbagai tingkatan maupun badan ad-hoc lainnya yang menangani penanganan Covid-19. Di Jawa Barat, terdapat pengklasifikasian level kewaspadaan berdasarkan 8²¹ indikator yang hasilnya di bagi menjadi lima level kewaspadaan, seperti sebagai berikut:

Tabel Level Kewaspadaan

LEVEL	KATEGORI		SKOR
Hijau	1	Rendah	21 - 24
Biru	2	Moderat	18 - 20
Kuning	3	Cukup Berat	15 - 17
Merah	4	Berat	12 - 14
Hitam	5	Kritis	8 - 11

Tabel 1 Level Kewaspadaan Menurut Pemerintah Jawa Barat.

Sumber: https://health.grid.id/read/352164159/ridwan-kamil-tangani-pandemi-covid-19-dengan-8-in-dikator-anies-baswedan-dengan-satu-kesatuan-epicenter?page=all

²¹ Kedelapan indikator ini adalah:

¹⁾ Laju ODP;

²⁾ Laju PDP;

³⁾ Laju Kesembuhan (recovery rate);

⁴⁾ Laju CFR;

⁵⁾ Laju Reproduksi Instan (Rt);

⁶⁾ Laju transmisi/Kontak Indeks (CI);

⁷⁾ Laju Pergerakan; dan

⁸⁾ Laju Geografi (berbatasan dengan wilayah transmisi lokal).

Setiap levelnya memiliki protokol-protokol pencegahan yang berbeda-beda, misalnya pembatasan pergerakan:

Protokol Umum Pencegahan Penularan Covid-19

Level Hitam/5	Pergerakan 0%, penerapan protokol kesehatan.
Level Merah/4	Pergerakan 30%, penerapan protokol kesehatan.
Level Kuning/ Oranye/3	Pergerakan 60%, penerapan protokol kesehatan.
Level Biru/2	Pergerakan 100% tanpa kerumunan, penerapan protokol kesehatan.
Level Hijau/1	Tidak ada pembatasan.

Tabel 2 Protokol Umum Pencegahan Penularan Covid-19 menurut Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rencana kontingensi tingkat Kabupaten/ Kota cukup menampilkan level kewaspadaan tingkat Kabupaten/Kota dan bisa diturunkan pada tingkatan Kecamatan atau bahkan Kelurahan/ Desa bila data tersedia.

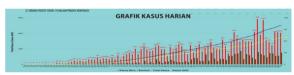
2. Kurva atau grafik epidemiologi Covid-19 di wilayah rencana kontingensi.

Kurva epidemiologi Covid-19 di wilayah cakupan rencana kontingensi juga harus ditampilkan sebagai dasar perumusan ancaman dampingan, karena kurva epidemiologi ini digunakan untuk mengetahui perkembangan kasus disebuah wilayah apakah telah memasuki masa puncak atau bahkan sudah melan-dai. Kurva epidemiologi mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan strategi pencegahan Covid-19, misalnya:

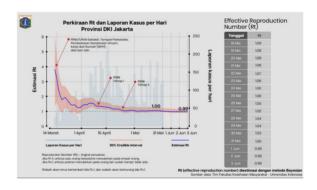
- Tingkat pergerakan, yang saat ini dikenal dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
- Digunakan dalam rencana kontingensi (bersama dengan level kewaspadaan bila

- ada) yang dibuat sebagai dasar penyusunan ske-nario.
- 3. Rencana tindakan.
- 4. Protokol-protokol pencegahan Covid-19.





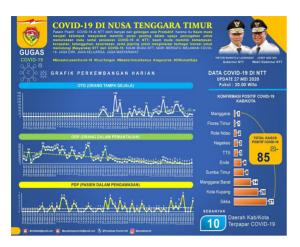
Gambar 3 contoh grafik kasus harian nasional pada 29 Mei 2020.²²



Gambar 4 Perkiraan Rt dan Laporan Kasus per-hari Provinsi DKI Jakarta, terlihat pada grafik ini Rt di DKI Jakarta pada angka 0,99.²³

²² Sumber Gugus Tugas PercepatanPencegahan Covid-19 tanggal 29 Mei 2020 pukul 12:00 wib.

²³ Sumber: https://corona.jakarta.go.id/storage/docu-ments/paparan-gubernur-dki-anies-baswedan-psbb-ma-sa-transisi-5ed8b73f98a93.pdf



Gambar 6 contoh grafik kasus harian di Provinsi Nusa tenggara Timur pada 27 Mei 2020.²⁴



Gambar 7 contoh sebaran kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Kupang pada 26 Mei 2020 pukul 18:00 wita.²⁵

Dalam rencana kontingensi tingkat Kabupaten/ Kota cukup menampilkan grafik tingkat Kabupaten/Kota saja.

3. Surat Keputusan Kepala Wilayah terkait Bencana Covid-19.

Surat Keputusan Kepala Wilayah terkait Bencana Covid-19 juga harus disertakan dalam merumuskan karakteristik ancaman bencana (dampingan).





Gambar 8 Contoh-contoh Surat Keputusan Kepala daerah tentang Penetapan Status Tanggap darurata Bencana Non-Alam Covid-19.

4. Virologi, daur hidup & rantai penularan SARS-Cov-2.

Virologi, daur hidup & rantai penularan SARS-Cov-2 sebagai virus penyebab Covid-19 harus pula disampaikan pada bagian ini. Sehingga protokol pencegahan bisa ditentukan beradasarkan karakteristik SARS-Cov-2 tersebut.

Pencegahan penularan Covid-19 Saat terjadi kedaruratan/bencana

Semua tindakan pencegahan ini dapat dibuat sebagai protokol-protokol pencegahan

²⁴ Sumber: Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTT tanggal 27 Mei 2020 pukul 20:00 wita. 25 Sumber: Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Kota Kupang pada 26 Mei 2020 pukul 18:00 wita.

penyebarluasan/penularan Covid-19 disaat terjadinya kedaruratan bencana dan menjadi bagian dalam rencana kontingensi yang dibuat.

Pada saat terjadi bencana yang diikuti dengan adanya pengungsian (baik hanya keluar rumah atau ke tempat lain yang lebih aman) maka upaya pencegahan ini harus tetap diberlakukan sebaik mungkin sehingga penularan disaat bencana dapat dikurangi risikonya.

Untuk menghindari penularan, maka diperlukan tindakan:

- Pengunaan masker bagi semua orang yang berada di wilayah penyebaran penyakit Covid-19 (baik yang sehat maupun yang sedang sakit).
- 2) Menjaga jarak penularan, yaitu paling tidak lebih dari 1,5 meter, sedangkan pada kasus bersin jarak akan lebih jauh lagi yaitu 4 meter.
- Selalu membersihkan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun selama 20 detik atau bila tak tersedia maka menggunakan cairan antiseptik.
- 4) Tidak menyentuh wajah dan mata.
- Melakukan pembatasan pergerakan, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah penularan Covid-19.

Tetap di rumah: bekerja dari rumah, sekolah dari rumah dan beribadah di rumah.

5. Protokol-protokol pencegahan penyebar-lu-asan/penularan Covid-19.

Protokol-protokol pencegahan penyebarluasan/ penularan Covid-19 dapat dituliskan berdasarkan masukan dari Dinas Kesehatan dan BPBD untuk selanjutnya dicantumkan pada bagian lampiran-lampiran rencana kontingensi.

Protokol-protokol mencakup, diantaranya namun tak terbatas pada:

a) Pembatasan jarak berupa jarak fisik dan jarak sosial (physical distancing & social

distancing) di tempat berkumpul, saat evakuasi dan tempat pengungsian.



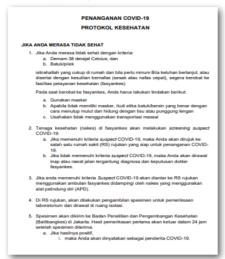
Contoh protokol pembatasan jarak atau kontak antar warga.

b) Pedoman Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS) di tempat berkumpul, saat evakuasi dan tempat pengungsian.



Contoh protokol tindakan pencegahan penularan dan tertular Covid-19.

 Pemeriksaan kesehatan penyintas & perespon penanganan bencana (relawan/ pekerja kemanusiaan).



Contoh protokol pemeriksaan dan penanganan.

d) Pedoman penempatan & penanganan penyintas di saat kedaruratan bencana dan di tempat penampungan atau pengungsian disaat pandemik Covid-19 (lihat pedoman SPHERE di saat Pandemik Covid-19)²⁶ Lihat Bab III.

Catatan:

Protokol-protokol ini dimasukkan ke dalam lampiran rencana kontingensi.

iii. Ancaman Ikutan.

Ancaman ikutan merupakan ancaman bencana yang diproyeksikan dapat menyertai ancaman utama, misalnya pasca terjadi gempa akan diikuti oleh ancaman adanya tanah longsor, kebakaran dan yang terbesar dan kerap terjadi yaitu tsunami demikianpula ancaman berupa masalah kesehatan masyarakat (penyakit menular, kekurangan air bersih, dll.).

Pada rencana kontingensi, berdasarkan analisa dan kesepakatan bersama dapat disertakan dengan adanya ancaman ikutan atau yang dikenal

26 Bisa diunduh di https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Coronavirus-guidance-2020 bahasa.pdf

sebagai ancaman sekunder (secondary hazard(s)).

Ancaman ikutan ini harus berbasiskan pada data ilmiah atau kesejarahan atau potensi yang bisa diprediksi kejadiannya.

iv. Responsif Jender & Inklusifitas Dalam Penanganan Bencana.

Keadaan responsif jender dan inklusifitas di wilayah yang menjadi lokus penyusunan rencana kontingensi harus dimasukkan dalam sebuah paragraf tentang kondisi/keadaan kesetaraan jender di daerah tersebut dalam bagian bab ini.

v. Contoh Pernyataan Karakteristik Ancaman Pada Rencana Kontingensi.

Prinsip pernyataan karakteristik ancaman pada rencana kontingensi:

- 1. Fokus pada lokus dan ancaman bencana.
- 2. Tidak terlalu panjang.
- 3. Tidak perlu dimulai dari ancaman secara nasional, cukup karakteristik ancaman di dae-rah. Kalaupun perlu cukup daerah di atasnya satu tingkat (misalnya provinsi) itupun jangan terlalu panjang.
- 4. Tidak perlu menampilkan kutipan-kutipan dokumen yang berada diatas rencana kontingensi secara hirarki (misalnya dokumen RPB atau Analisa Risiko daerah atau analisa karakteristik ancaman dari dokumen lain) pada badan dokumen rencana kontingensi, namun bisa dinarasikan pada catatan kaki sebagai sumber dokumen/ pernyataan.
- 5. Tidak perlu menampilkan proses penentuan risiko melalui matrik analisa risiko, cukup menyebutkan hasil bahwa ancaman A adalah ancaman prioritas atau prioritas utama atau bahkan bukan prioritas amun perlu segera dibuatkan risikonya Karenna beberapa pertimbangan (sebutkan pertimbangan-pertimbangan tersebut).

Berikut ini adalah contoh pernyataan karakteristik ancaman utama pada rencana kontingensi:²⁷

Karakteristik Ancaman Utama²⁸

Sesar Lembang merupakan salah satu sesar aktif di Provinsi Jawa Barat. Sesar Lembang terletak di utara Kota Bandung di Jawa Barat, dan berada di selatan Gunung Tangkuban Perahu, salah satu gunung api aktif di Indonesia. Secara morfologi Sesar Lembang merupakan gawir yang memanjang dan membentang pada arah Barat-Timur sepanjang 29 Km dengan titik nol kilometer di daerah Padalarang dekat jalan tol, dan sisi Timur di daerah Batu Lonceng atau Gunung Manglayang sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1 (Tjia, 1968, Setiadji, 1997; Nossin, 2002; Supartoyo dkk., 2005; PuSGeN, 2017, Daryono, 2019). Sesar ini merupakan terusan dari ujung utara sesar Cimandiri, dan memiliki mekanisme oblique dengan komponen dominan sesar geser mengiri dan sebagian sesar Daryono (2019) Sesar Lembang mempunyai periode ulang terjadi sekitar 170 hingga 670 tahun dan terakhir kali terjadi adalah sekitar 500 tahun yang lalu. Laju geser Sesar Lembang diestimasi sebesar 3- 14 mm/th (Abidin, 2008, 2009), 6 mm/tahun (Meilano dkk, 2012), 2-6 mm/tahun (Daryono, 2016), dan 2 mm/tahun (PuSGeN, 2017) dengan pergerakan geser sinistral pada kedalaman 3-15 Km. Daryono (2016, 2019) meneliti secara detail sesar ini dengan menggunakan metode tektonik geomorfologi dan paleoseismology



Gambar Peta Sesar Lembang Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

kemudian membagi sesar Lembang menjadi 6 bagian (gambar 2), yaitu segmen Cimeta, Cipogor, Cihideung, Gunung Batu, Cikapundung, dan Batu Lonceng. Bagian barat dari Sesar Lembang melewati wilayah padat penduduk, seperti daerah Parongpong yang mengalami gempa pada 28 Agustus 2011.

Kegempaan di Sesar Lembang dinilai aktif terbukti dari beberapa kejadian gempa yang pernah terjadi, yaitu sebanyak paling tidak enam kali dalam kurun waktu 2009 - 2017 (Gambar 2, Supendi BMKG, 2017). Hasil penentuan mekanisme fokus di sepanjang sesar lembang menunjukan sesar mengiri (left-lateral faulting), meskipun event paling timur menunjukkan sesar oblique dominan turun. Hasil pemodelan peta tingkat guncangan (shakemap) oleh BMKG dengan skenario gempa dengan kekuatan M=6,8 dengan kedalaman hiposenter 10 km di zona Sesar Lembang (garis hitam tebal), menunjukkan bahwa dampak gempa dapat mencapai skala intensitas VII-VIII MMI (setara dengan percepatan tanah maksimum 0,2 - 0,4 g) dengan diskripsi terjadi kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang kuat. Dinding tembok dapat lepas dari rangka, monument/ menara roboh, dan air menjadi keruh. Sementara untuk bangunan sederhana non-struktural dapat dapat terjadi kerusakan berat hingga dapat menyebabkan bangunan roboh. Secara umum skala intensitas VII- VIII MMI dapat mengakibatkan terjadinya goncangan sangat kuat dengan kerusakan sedang hingga berat.

²⁷ Disadur dari buku "Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana (Edisi Ke-empat)" Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019.

²⁸ Pada contoh ini, terlihat banyak referensi yang digunakan dan hanya menyantumkan kesimpulan narasumber, lembaga dan tahun pernyataan/terbit dan tidak mengkopi dan menempelkan narasi sumber secara utuh dari data sumber yang digunakan.



Wilayah Kecamatan yang berlokasi paling dekat dengan sesar Lembang adalah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah dan Padalarang.

Berikut ini adalah contoh pernyataan karakteristik ancaman dampingan pada rencana kontingensi:²⁹

Contoh 130:

Karakteristik Ancaman Dampingan Di Kota Kupang, NTT.

Kasus Covid-19 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur per-27 Mei 2020 terdapat 10 Kabupaten/ Kota yang terpapar, termasuk Kota Kupang dengan total kasus positif Covid-19 sejumlah 20 orang. Pasien positif di provinsi ini banyak diidap oleh golongan usia produktif.



Gambar Grafik Perkembangan Harian Covid-19 di Penyebaran Covid-19% vinskottal Kupang per 26 Mei

2020 tersebar pada 6 kecamatan dengan jumlah penderita 20 orang dan terbanyak di Kota Raja dan Oebobo yaitu masing-masing 7 orang. Seluruh kecamatan di Kota Kupang rentan terhadap terjadinya gempa.

Kelurahan di Kota Kupang yang memiliki kasus positif Covid-19 per tanggal 19 Mei 2020 adalah Kelurahan Nunleu, Kuanino, Tuak Daun Merah (TDM) dan Oesapa.



Gambar Sebaran Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kota Klaster penyel daran Gord 259 di provida NTT, klaster yang teridentifikasi adalah klaster Gowa, Bethel, 31 dan KM Lambelu 32. Sementara untuk Kota Kupang adalah Klaster Setukpa Lemdikpol Sukabumi 33 dan transmisi lokal 34.

Penyebaran Covid-19 di masyarakat disebabkan oleh penularan langsung dan penularan tidak langsung. Penularan langsung adalah penularan akibat terpapar droplets dari penderita Covid-19 baik yang menunjukkan gejala (positif Covid-19) maupun yang tidak menunjukkan gejala (OTG).

sus-transmisi-lokal-covid19-di-kota-kupang-meluas

²⁹ Pernyataan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di wilayah lokus rencana kontingensi dengan bekerjasama dengan dinas kesehatan, BPBD dan Gugus Tugas Percepatan Penaganan Covid-19 setempat.

³⁰ Pada contoh ini terlihat referensi yang digunakan dan menampilkannya sebagai catatan kaki sebagai sumber informasi dan tidak mengkopi dan menempelkan narasi sumber secara utuh dari data sumber yang digunakan.

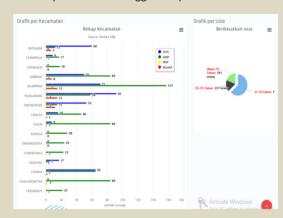
³¹ Sumber: https://regional.kompas.com/
read/2020/05/13/16270221/update-corona-di-ntt-tambah-12-kasus-positif-mayoritas-klaster-ijtima-ulama
32 Sumber: https://regional.kompas.com/
read/2020/05/14/14543081/update-corona-di-ntt-tambah9-kasus-positif-sebagian-besar-klaster-km
33 Sumber: https://kupang.kompas.com/
read/2020/05/18/23153351/258-warga-kupang-terlacaklakukan-kontak-dengan-5-pasien-positif-covid-19
34 Sumber: https://republika.co.id/berita/qal3hv383/ka-

Contoh 2:

Karakteristik Ancaman Dampingan di Kabupaten Bandung Barat

Kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat per 3 Juni 2020 adalah 63 orang positif, 441 OTG, 742 ODP dan 32 PDP. Dari total kasus, persentase positif Covid-19 adalah 4,93%³⁵. Dalam level kewaspadaan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam Level Kewaspadaan 2 atau Biru, dimana pergerakan masih 100% persen namun larangan kerumunan diberlakukan. Kecamatan Ngamprah dan Padalarang adalah kecamatan terbanyak kasus positif Covid-19, sedangkan kecamatan Lembang terdata 8 orang positif Covid-19, 84 ODP dan 50 OTG.

Angka reproduksi aktif atau Rt di tingkat Jawa barat per 2 Juni 2020 adalah 0,68 dari sebelumnya 4 pada bulan April 2020³⁶ sehingga cukup rendah.



Grafik Covid-19 per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.



Tabel Covid-19 per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Klaster penyebaran Covid-19 di Bandung Barat diantaranya adalah acara keagamaan kristiani di Lembang³⁷.

Penyebaran Covid-19 di masyarakat disebabkan oleh penularan langsung dan penularan tidak langsung. Penularan langsung adalah penularan akibat terpapar droplets dari penderita Covid-19 baik yang menunjukkan gejala (positif Covid-19) maupun yang tidak menunjukkan gejala (OTG).

³⁵ Diunduh dari https://pik.bandungbaratkab.go.id/ pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 15:00 WIB.

³⁶ Sumber https://polkrim.news/reproduksi-covid19-di-jabar-kini-di-angka-068-terus-menurun

³⁷ Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5010765/5-klaster-covid-19-terdeteksi-di-jabar-gugus-tugas-tak-bertambah

Berikut ini adalah contoh pernyataan karakteristik ancaman lanjutan pada rencana kontingensi:

Contoh 1:

Karakteristik Ancaman Ikutan Di Kabupaten Alang-alang

Ancaman lanjutan yang berpotensi pasca gempa adalah tanah longsor di wilayah A, B dan G serta kebakaran di wilayah yang padat penduduknya. Cidera akibat tertimpa bangunan dapat terjadi di wilayah yang terjadi bangunan runtuh dan juga beberapa penyakit dapat terjadi di tempat-tempat pengungsian.

Contoh 2:

Karakteristik Ancaman Ikutan Di Kabupaten Baling-balang

Ancaman lanjutan yang berpotensi pasca gempa adalah jebolnya tanggul walangkekek yang dapat menyebabkan banjir bandang di DAS sungai walangkeke.

b. Skenario Kejadian Bencana.

Skenario Kejadian Bencana dan Asumsi Dampak dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari **BAB I: SITUASI** dan merupakan Sub-Bab **1.2.Skenario Kejadian Bencana dan Asumsi Dampak**

Skenario kejadian bencana pada rencana konti-ngensi merupakan prakiraan kejadian yang mungkin timbul akibat suatu kejadian atau bencana yang melanda, skenario ini dibangun berdasarkan pada pertimbangan:

- 1. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian utama.
- 2. Lokus pusat atau episentrum kejadian dan dampaknya pada wilayah.
- 3. Waktu kejadian.
- 4. Besarnya kekuatan kejadian.
- 5. Lamanya kejadian.
- 6. Kecepatan kejadian.
- 7. Jarak antara pusat atau episenter bencana dengan wilayah lain yang mungkin terdampak.
- 8. Proses terjadinya kejadian/bencana.
- 9. Kondisi terburuk yang mungkin terjadi.
- 10. Kemungkinan atau potensi terjadinya ancaman dampingan.
- 11. Kemungkinan atau potensi terjadinya ancaman ikutan (secondary hazard(s)).

Skenario yang dibuat memang memilih skenario yang terparah, namun bila hanya berdasarkan pada proyeksi kejadian yang terparah maka pada akhirnya semua tindakan penanganan darurat bencana akan dilimpahkan kepada Provinsi atau bahkan Nasional. Oleh karena itu, unsur lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan kejadian yang masih dapat ditangani oleh wilayah setempat. Sehingga skenario terparah tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan kemampuan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, skenario terparah rencana kontingensi tingkat provinsi berdasarkan kemampuan Provinsi dan demikian pula untuk tingkat nasional, dengan tetap memper-timbangkan skema permohonan bantuan

kepada pemerintahan di atasnya.

Skenario dapat berbentuk narasi, tabel maupun gambar. Pemilihan bentuk skenario harus memper-timbangkan kemudahan pihak lain dalam membaca dan memahaminya sehingga bantuan atau kon-tribusi yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan penanganan kedaruratan bencana. Jangan memilih bentuk penyampaian skenario berdasarkan kesukaan individu/tim atau mitos atau bahkan kemudahan dalam merumuskannya.

Berikut ini adalah contoh-contoh skenario pada rencana kontingensi:

Berupa gambar ilustrasi



Contoh skenario yang disajikan dalam bentuk gambar.

- Kesepakatan Waktu kejadian: Rabu,1 Januari 2020, Pkl 02.00 WIB dini hari
- Magnitudo 6,8 (PuSGeN, 2017)
- Episenter: 6°50'1.17"S; 107°38'5.98"E (bintang merah)
- · Kedalaman: 10 km
- Durasi goncangan gempa utama: 60"
- Gempa susulan: 60 kali dalam 24 jam, terdistribusi arah barat-timur
- Goncangan gempa sangat kuat hingga sulit berdiri, deformasi permukaan pada patahan, memicu longsor di beberapa lokasi dan kebakaran

Berupa tabel

Asumsi	Hari/ Tanggal: xx Juni 2020 Jam 00.05 WIT
Waktu Kejadian	
Durasi, Intensitas	Periode waktu hujan selama 2 jam dengan intensitas lebat disertai pasang air laut maksimum terjadi.
Cakupan wilayah	1) Distrik Bintano Kelurahan Bintano Barat:
terdampak	Kp. Pensiuann; Kp. Tinolak; Komplek Telkomsel; Kp. Wediri; Kp. Asoup; Komplek Lapas/ Perumahan DPR; Kompi;; km 2; km 3; km 4; Cutibowo. Kelurahan Bintano Timur:
	Kp. Bina Desa, Pasar Sentral, SP V/ Argo Sigemerayou, Kp. Nusantara; (Komplek PLTD) Kp. Lamaudau, Kp Marsina, Kp. Tuasaipi, Kp. Igariji, Kp Beimels 2) Distrik Tohibao
	Kp Sipena Raya; Kp Sipena Permai, Kp Agromeda, Kp. Tohibao; Kp. Mincimamicin
Ancaman Utama/ Primer	Banjir
Ancaman	Covid-19
Dampingan	Di Kabupaten Teluk Bintano per tanggal 3 Juni 2020 terdata 44 orang warga positif Covid-19 (43 orang berasal dari kelompok OTG & 1 berasal dari ODP), tersebar di Distrik Bobo, Bintano 2 dan Malimeri 2.
	Pada akhir Mei 2020 kurva penularan Covid-19 menanjak naik namun diharapkan pada akhir Juni 2020 akan menurun.
Ancaman Sekunder	Longsor

Berupa narasi

Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 02:03 wib dinihari terjadi gempa dengan magnitudo 6,8 dengan episenter 6°50′1,17″S; 107°38′98″E kedalaman 10 km pada sesar Lembang, durasi guncangan 60 detik. Terdapat gempa susulan sebanyak 60 kali dalam jangka waktu 24 jam, terdistribusi arah barat-timur. Melihat kekuatan magnitudo dan kedalamannya maka kemungkinan akan banyak bangunan yang kurang kuat strukturnya roboh dan menimpa penghuninya serta akan terjadi pengungsian yang cukup besar di wilayah yang merasakan guncangan gempa di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

³⁸ Nama wilayah adalah nama fiktif.

Kecamatan Ngamprah, Padalarang dan Lembang yang merupakan wilayah Kecamatan yang dekat dengan sesar merupakan daerah sebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Kecamatan Ngamprah dan Padalarang adalah Kecamatan dengan jumlah tertinggi positif Covid-19 yaitu 15 orang di masing-masing kecamatan tersebut dan 8 orang di Kecamatan Lembang. Angka reproduksi aktif (Rt) untuk di Jawa Barat adalah 0,68 dan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk di dalam Level Kewaspadaan 2 atau Biru, dimana pergerakan boleh 100% namun kumpulan orang dilarang. Penggunaan masker dan menjaga jarak harus diaplikasikan pada para pengungsi dan pekerja kemanusia-an/ relawan yang bertugas untuk menghindari penularan Covid-19.

c. Asumsi Dampak.

Skenario Kejadian Bencana dan Asumsi Dampak dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari **BAB I: SITUASI** dan merupakan Sub-Bab **1.2. Skenario Kejadian Bencana dan Asumsi Dampak**

Asumsi dampak pada kejadian yang diskenariokan dalam rencana kontingensi haruslah mampu men-jawab dampak yang di duga dialami pada aspek kependudukan, ekonomi & sumber penghidupan, sarana & prasarana vital (*lifeline*), lingkungan, dan keamanan.

a) Aspek Kependudukan.

Pada aspek ini, rencana kontingensi harus dapat menyajikan dampak bencana pada penduduk di lokasi yang terdampak bencana, berupa:

- 1. Jumlah total penduduk.
- 2. Jumlah penduduk yang berisiko terhadap ancaman utama.
- 3. Jumlah penduduk yang terkena dampak ancaman utama, dampingan dan ikutan.
- 4. Jumlah penduduk yang tercerabut (*displa-ced persons*) dari kediamannya.
- 5. Jumlah penduduk yang terancam akibat ancaman dampingan (Covid-19).

Gambaran penduduk yang disajikan untuk rencana kontingensi tingkat kabupaten/kota adalah minimal di tingkat Kecamatan, namun akan lebih bagus bila dapat menyajikannya pada tingkat Desa/Kelurahan.³⁹ Gunakanlah data terkini.

Dampak pada bidang kesehatan dapat dimasukkan pada aspek kependudukan.

b) Aspek Ekonomi dan Sumber Penghidupan.

Aspek ekonomi dan sumber-sumber penghidupan masyarakat yang terganggu atau rusak dapat diperkirakan dan dicantumkan dalam rencana kontingensi. Namun dalam rencana kontingensi, data aspek ini bukan diperuntukkan untuk menghitung kerugian atau nilai ekonomi yang hilang. Tetapi melihat pada dampaknya pada produktifitas masyarakat, potensi timbulnya masalah sampingan (misalnya kelaparan atau kelangkaan bahan pokok), serta adanya potensi terganggunya atau hilangnya dukungan operasi penanggulangan bencana.

Sumber-sumber penghidupan bisa berupa pertain-an, peternakan, perikanan, perdagangan, restoran, pariwisata, nelayan, transportasi, dll.

c) Aspek Sarana & Prasarana (lifeline).

Pada rencana kontingensi aspek sarana &

³⁹ Sumber data bisa menggunakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) atau Dinas yang mengurusi pencatatan sipil.

prasarana atau fisik ini dihitung bukan untuk menghitung nilai ekonomi, kerusakan atau kerugian yang nantinya akan digunakan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi, namun untuk menghitung dan mendata fasilitas utama pendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus segera berfungsi kembali, seperti jalan yang rusak, jembatan yang rusak, jaringan listrik yang rusak dan terganggu, jaringan air bersih yang rusak dan terganggu, dll. termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, BBM, pemadam kebakaran, pertolongan dan penyelamatan, keamanan dan keselamatan wilayah & Negara, tempat ibadah, terminal/banda-ra/pelabuhan, dll.

d) Aspek lingkungan.

Aspek ini mempertimbangkan kondisi lingkungan disaat terjadinya bencana atau masa tanggap daru-rat penanganan bencana, termasuk interaksi dengan hewan yang bisa saling terancam (manusia dan hewan) akibat terjadinya bencana.

Aspek ini meliputi:

- 1) Sumber daya air.
- 2) Kualitas udara.
- 3) Kualitas tanah.
- 4) Hutan dan keanekaragaman hayati⁴⁰.

Kisah bertemunya hewan buas dengan manusia di wilayah bencana kerap terjadi, baik bencana kebakaran hutan dan lahan⁴¹, gunung meletus⁴² bahkan saat bencana Covid-19⁴³ dimana 40 https://www.merdeka.com/peristiwa/derita-piton-si-raja-ular-king-kobra-sampai-mati-terpanggang-kebakaran-hutan.html

- 41 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151028125652-20-87875/tentara-di-hutan-terbakar-bertemu-hewan-buas-dan-kobaran-api dan https:// news.detik.com/berita/d-2510662/kisah-pemadam-ngibrit-karena-bertemu-harimau-saat-jinakkan-api-di-hutan
- 42 <u>https://nasional.tempo.co/read/291223/harimaugunung-turun-ke-kampung-akibat-erupsi-merapi</u>
- 43 https://www.merdeka.com/foto/dun-

masyarakat tidak keluar rumah sebagai upaya pencegahan penularan penyakit tersebut.

e) Aspek Layanan Pemerintah.

Pelayanan pemerintahan yang terganggu di daerah termasuk termasuk di kecamatan dan desa, berikut ini (tapi tidak terbatas pada):

Keimigrasian, Kependudukan, Pengurusan adminis-trasi penting, Kesehatan, Pendidikan.

f) Aspek Keamanan.

Aspek yang dipertimbangkan disini adalah adanya ancaman keamanan dan keselamatan masyarakat dan kepemilikannya pada saat terjadi bencana atau masa tanggap darurat.⁴⁴

Berikut ini adalah contoh pernyataan dampak pada rencana kontingensi⁴⁵:

ia/1169846/20200422210710-binatang-buas-berkeliaransaat-pembatasan-sosial-di-israel-001-debby-restu-utomo. html

- Pada saat terjadinya gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Palu, Donggala dan Sigi terjadi kerusuhan dan penjarahan.
- 45 Contoh asumsi dampak ini diambil dari Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bintuni, 2019 dengan adaptasi pada pandemik Covid-19 oleh penulis.

Asumsi Dampak Kejadian bencana Banjir & Tanah Longsor di Kabupaten Bintuni

Aspek Kependudukan

PENDUDUK TERDAMPAK

Jumlah Penduduk Terdampak: 7230 orang, dengan rincian sebagai berikut: **Distrik Bintuni**

Kelurahan	Kampung	Penduduk Terdampak (dalam Jiwa)
Bintuni Barat	Pensiun	50
	Tolak	100
	Komplek Telkom	150
	Kp. Wesiri	150
	Kp. Asou	150
	Komplek Lapas/ Perumahan DPR	50
	Kompi	150
	km 2	300
	km 3	300
	km 4	180
	Cutibo	200
Bintuni	Kp. Bina Desa	500 jiwa
Timur	Pasar Sentral	300 jiwa
	SPV/Argo Sigemeray	800 jiwa
	Kp. Nusantara	300 jiwa
	Kp. Lama	1500 jiwa
	Kp Masina	100 jiwa
	Kp. Tuasai	100 jiwa
	Kp. Iguriji	150 jiwa
	Kp Beimes	150 jiwa

Distrik Lainnya juga dituliskan disini

LUKA - LUKA

Distrik Bintuni

Kelurahan Bintuni Barat

Jumlah luka-luka 376 jiwa, dengan rincian sbb:

- 1. Luka berat :19 jiwa (5% dari total penduduk luka luka)
- 2. Luka sedang:56 jiwa (15% dari total penduduk luka luka)
- 3. Luka ringan: 301 jiwa (80% dari total penduduk luka luka)
- 4. Yang Tidak Luka-Luka 1504 Jiwa
- 5. Meninggal: 9 Jiwa (0,5 % dari total Penduduk terpapar)
- 6. Sakit: 376 jiwa (20% dari total penduduk terdampak)

Kelurahan Bintuni Timur

Jumlah luka-luka 1248 jiwa dengan rincian sbb:

- 1. Luka berat :62 jiwa (5% dari total penduduk luka luka)
- 2. Luka sedang: 187 jiwa (15% dari total penduduk luka luka)
- 3. Luka ringan: 998 jiwa (80% dari total penduduk luka luka)
- 4. Yang Tidak Luka-Luka 3120 Jiwa
- 5. Meninggal: 20 Jiwa (0,5 % dari total Penduduk terpapar)
- 6. Sakit:20 jiwa (20% dari total penduduk terdampak)

Distrik Lainnya juga dituliskan disini

Aspek Fisik, Sarana & Prasa-rana

Rumah Terdampak

Jumlah Rumah terdampak yang rusak: 376 unit

Distrik Bintuni

Kelurahan	Kampung	Rusak Berat	Rusak Ringan
Bintuni Barat	Kp Pensiun	40 Unit	10 Unit
	Kp. Tolak	4 Unit	6 Unit
	Komplek Telkom	6 Unit	24 Unit
	Kp. Wesiri	6 Unit	24 Unit
	Kp. Asou	6 Unit	24 Unit
	Lapas/ Komplek DRPD	2 Unit	8 Unit
	Kompi	6 Unit	24 Unit
	KM 2	12 Unit	28 Unit
	KM 3	12 Unit	48 Unit
	KM4	3 Unit	13 Unit
	Kamp. Cutibo	8 Unit	32 Unit

Jumlah Rumah terdampak yang rusak: 780 unit

Kelurahan	Kampung	Rusak Berat	Rusak Ringan
Bintuni Timur	Kp. Bina Desa	20	80
	Pasar Sentral	12	48
	SPV/Argo	32	120
	Sigemeray		
	Kp. Nusantara	12	48
	Kp. Lama	60	240
	KpMasina	4	16
	Kp. Tuasai	4	16
	Kp. Iguriji	6	24
	KpBeimes	6	24

Aspek Ekonomi & Sum-ber Penghi-dupan

DISTRIK BINTUNI

- **Kegiatan ekonomi terganggu cenderung akan lumpuh** di 2 kecamatan, 24 desa; akses dan layananyang terganggu 94
- Kehilangan dari Sektor Pasar.

Ada 40 toko yang terdampak.

- Kehilangan dari Sektor Peternakan.

Unggas 200 Ekor, ternak besar 50 ekor

- Kehilangan dari Sektor Pertanian/ Perkebunan
 - Dampak terhadap pasokan pupuk, bibit dll
 - Dampak terhadap distribusi hasil pertanian
 - Dampak pada tanaman pertanian/perkebunan
 - dampak terhadap harga komoditi pertanian/perkebunan
 - dampak pada penghasilan/PendapatanPetani
- Kehilangan sector perindustrian.

Dampak terhadap industry besar, menegah, kecil (home industry)

Distrik Lainnya juga dituliskan disini

Aspek Lingku-ngan

DISTRIK BINTUNI

- Air:

Dampak terganggunyainfrastrukturpengairan (air bersih dan pengairan pertanian, sumber air dari sungai dan sumur)

- Tanah/Lahan:
 - a. Dampakterhadaphilangnya/terganggunya lahanu ntuk perkebunan, pertanian, dan permukiman.
 - b. Dampak terhadap akses jalana kan terganggu, menyulitkan proses evakuasi.
- Udara:

Dampak pada kualitas udara (peningkatan debu)

- Hutan:
 - a. Dampak pada ekosistem yang terganggu

Kawasan hutan yang terdampak (HP, Kawasan konservasi, dll)

Distrik Lainnya juga dituliskan disini

Aspek Layanan Pemerintahan	 DISTRIK BINTUNI Pelayanan pemerintahan yang terganggu di level kecamatan, desa (berapa lama terganggu) selama 14 hari. layananpemerintahanberupa :
Covid-19	Di Kabupaten Teluk Bintuni per tanggal 3 Juni 2020 terdata 44 orang warga positif Covid-19 (43 orang berasal dari kelompok OTG & 1 berasal dari ODP) ⁴⁶ , tersebar di Distrik Babo, Bintuni 2 dan Manimeri 2. ⁴⁷

 $^{46 \}quad Sumber \ \underline{https://republika.co.id/berita/qbbw86423/kasus-covid19-di-teluk-bintuni-diperkirakan-akan-turun}$

⁴⁷ Sumber https://klikpapua.com/papua-barat/teluk-bintuni/kasus-positif-covid-19-di-bintuni-ada-penambahan-8-orang-satunya-bayi.html

Bab Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana di Mas Pandemik Covid-19

a. Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana

Pada rencana kontingensi, rencana penanganan kedaruratan harus ditampilkan karena rencana penanganan inilah yang nantinya diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan rencana operasi bila terjadi bencana atau keadaan darurat seperti yang tercantum pada skenario kejadian (atau mirip).

Rencana penanganan ini berbasis pada sistem komando penanganan kedaruratan bencana (baik *Incidents Command System/ICS* maupun Peraturan Kepala BNPB No 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana⁴⁸), dalam Perka ini sistem komando penanganan darurat bencana didefinisikan sebagai:



Satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penaganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana

 $^{48\} Bisa\ diunduh\ di\ https://bnpb.go.id/uploads/24/peraturan-kepala/2016/perka-bnpb-03-tahun-2016-tentang-sistem-komando-penanganan-darurat-bencana.pdf$



Nama organisasi komando⁴⁹ tidaklah terlalu mengikat namun fungsi komandolah yang harus diperhatikan, dalam sistem komando harus memiliki 5 fungsi dasar⁵⁰, yaitu:

- 1) komando, kendali, koordinasi, komunikasi & informasi;
- 2) perencanaan;
- 3) operasi;
- 4) logistik;
- 5) administrasi & keuangan.

Dengan panduan struktur sebagai berikut:

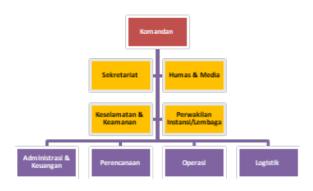
⁴⁹ Contoh nama sistem komando:

¹⁾ pada penanganan bencana gempa di Lombok dan Palu-Donggala Sigi disebut Kogasgabpad (Komando Tugas Gabungan Terpadu);

²⁾ pada penanganan Covid-19 bernama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan adapula Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;

³⁾ Komando Penanganan Darurat Gunung Agung di karangasem untuk penanganan darurat bencana erupsi gunung Agung.

Lima fungsi dasar ini pada dasarnya bersumberkan pada konsep ICS dan memang terbukti mampu dijalankan dan baik dalam aspek transparansi dan akuntabilitas organisasi/komando dalam menjalankan tugas dan fungsinya



Gambar 12 Struktur Organisasi Penanganan Kedaruratan Bencana.

Komandan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum.

Staf Komando terdiri atas:

- 1. Sekretariat.
- 2. Hubungan Masyarakat dan media massa.
- 3. Keselamatan dan Keamanan.
- 4. Perwakilan Instansi/Lembaga.

Staf Umum terdiri atas:

- 1. Bidang Perencanaan
- 2. Bidang Operasi
- 3. Bidang Logistik dan Peralatan
- 4. Bidang Administrasi Keuangan

Organisasi komando ini dapat dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan lokus wilayah rencana kontingensi yang dibuat.

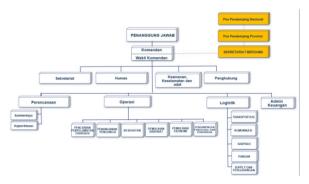
Dalam sebuah sistem komando yang baik, seorang pemimpin (komandan/ketua bidang/ koordinator seksi atau apapun namanya) sebaiknya tidak memimpin lebih dari 7 orang dan tak kurang dari 2 orang. Sehingga bila lebih dari 7 maka bisa dipertimbangkan adanya penggabungan dengan melihat pada kemiripan fungsi, demikian pula bila hanya 1 maka bisa dipertimbangkan adanya pemisahan berdasarkan adanya perbedaan fungsi.

Struktur organisasi tersebut merupakan organisasi standar dan dapat diperluas berdasarkan

kebutuhan.

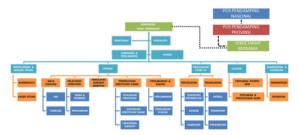
Demikian pula, sesuai dengan jenis, kebutuhan dan kompleksitas Bencana, dapat dibentuk unit organisasi dalam bentuk seksi-seksi⁵¹ yang berada di bawah Bidang dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Berikut ini adalah contoh struktur organisasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten teluk Bintuni yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah:



Gambar 13 Contoh Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana yang telah dikembangkan sesuai jenis bencana dan situasi/kondisi di wilayah.

Pada contoh struktur komando tersebut di atas, fungsi komando, kendali, koordinasi, komunikasi & informasi dibantu secara tetap oleh Unit Sekretariat, Unit Humas, Unit Keamanan,



Gambar 14 Contoh Struktur Organisasi Penanganan <u>Darurat Bencana d</u>isaat pandemik Covid-19 yang telah

51 Sebutan seksi-seksi ini dapat diganti sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan di wilayah.

52 Untuk contoh struktur yang lebih jelas terlihat silahkan lihat pada Lampiran A halaman 33 tentang Struktur Organisasi.

dikembangkan sesuai jenis bencana dan situasi/kondisi di wilayah.

b. Tugas Pokok Komando Penanganan Kedaruratan Bencana.

Tugas Pokok dalam dokumen rencana kontingensi adalah **BAB II: TUGAS POKOK**

Dalam rencana kontingensi harus memuat tugas pokok yang menjadi wewenang komando beserta semua unsurnya dalam penanganan darurat bencana. Tugas pokok ini masuk ke dalam Bab II.

Pernyataan tugas pokok ini harus mencakup unsur:

- 1. Siapa yang melaksanakan.
- 2. Apa yang dilaksanakan.
- Kapan dan Durasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- **4. Lokasi** atau **Wilayah** penanganan darurat bencana. Serta
- **5. Tujuan** operasi penanganan darurat bencana.

Pernyataan ini cukup tertulis dalam satu paragraph saja. Jangan melebar atau terjebak pada narasi yang melebar atau terlalu detil.

Berikut ini adalah beberapa contoh pernyataan tugas pokok komando penanganan darurat bencana pada rencana kontingensi:

Contoh 1

Organisasi Darurat Bencana Kabupaten Teluk Bintano melaksanakan operasi penanganan darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari di Kabupaten Teluk Bintano, dalam meminimalisir korban jiwa dan harta benda serta melakukan pencegahan penularan Covid-19 dengan memperhatikan kesetaraan jender dan inklusifitas.

Contoh 2

Organisasi Penanganan Darurat Bencana Gempa di Kabupaten Blandung Barat melaksanakan operasi penanganan darurat selama 30 hari dalam rangka meminimalisir korban jiwa dan harta benda serta mencegah penularan Covid-19 di Kabupaten Blandung Bara dengan memperhatikan kesetaraan jender dan inklusifitas.

c. Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana Berbasis Sistem Komando.

Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana Berbasis Sistem Komando dalam dokumen rencana kontingensi adalah BAB III: PELAKSANAAN

Pada Bab III ini, rencana kontingensi memuat konsep operasi, fungsi-fungsi, tugas-tugas dan instruksi & koordinasi pada sistem komando/ organisasi penanganan darurat bencana, yang akan dilaksanakan saat penanganan darurat bencana. Hal ini akan mempermudah pelaksana komando penanganan darurat bencana dalam membuat rencana operasi nantinya.

i. Konsep Operasi.

Konsep Operasi dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari BAB III: PELAKSANAAN dan merupakan Sub-Bab 3.1. Konsep Operasi

Konsep operasi pada rencana kontingensi memberikan panduan rangkaian tindakan bagi pelaksana penanganan darurat bencana, di mana tindakan ini dilaksanakan pada fase/ tahap tanggap darurat bencana⁵³ (pada hari H dan jam J) seperti

Fase Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan taktis operasional yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiayang tercantum dalam skenario kejadian.

Konsep Operasi ini merupakan Sub Bab 3.1 pada Bab III dokumen rencana kontingensi.

Contoh pernyataan konsep operasi:

Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Blandung Barat melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di saat pandemik Covid-19 selama 30 hari terhitung mulai hari "H" jam "J" sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Kejadian Bencana, Status tanggap Darurat dan Penunjukkan Komandan Penanganan Darurat Bencana dengan langkah yang mencakup:

- 1. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban.
- 2. Melakukan aktivasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.
- 3. Melaksanakan kaji cepat/penilaian awal.
- 4. Melakukan konsolidasi lintas sektor.
- 5. Melaksanakan pemulihan infrastruktur darurat.
- 6. Melakukan pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terdampak.
- 7. Memberikan pelayanan Medis Masyarakat Terdampak dan Korban termasuk perlindungan kelompok rentan (Lansia, Ibu Hamil, DII).
- 8. Melakukan pengamanan masyarakat terdampak dan aset masyarakat yang terdampak.
- 9. Melaksanakan pemulihan Ekonomi Dini.
- 10. Memberikan pendampingan penanganan pertama psikologi dan dukungan psikososial.
- 11. Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 bagi penyintas dan pelaksana penanganan darurat bencana gempa bumi.
- 12. Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana.

Pada bencana yang bisa diprediksi, seperti banjir, maka fase pelaksanaan bisa dimulai sejak fase/tahap kesiagaan (readiness).

Contoh pernyataan konsep operasi pada bencana yang bisa diprediksi:

Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Banding melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan bencana alam tanah longsor disaat pandemik Covid-19 yang dilaksanakan dalam dua fase readiness &, tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai hari "H" jam "J" dengan langkah yang mencakup;

Pada tahap readiness dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Memonitoring informasi dari BMKG, ESDM, dan BPBD.
- 2. Melaksanakan koordinasi lintas OPD.
- 3. Memberikan informasi peringatan dini.
- 4. Memberikan sosialisasi dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat.
- 5. Menyiapkan lokasi pengungsian.

tan- kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, perlindungan pengungsi/penyintas, pemulihan darurat, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam penanganan darurat (Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana – Edisi Ke-14 – BNPB, 2019 halaman 36).

- 6. Mempersiapkan dan menentukan lokasi posko.
- 7. Masing-masing OPD teknis menyiapkan sumberdaya (manusia dan peralatan).
- 8. Melaksanakan latihan evakuasi mandiri.
- 9. Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 bagi penyintas dan pelaksana penanganan darurat bencana tanah longsor.
- 10. Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan kesiagaan bencana.

Pada tahap tanggap darrat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban.
- 2. Melaksanakan kaji cepat/penilaian awal.
- 3. Melakukan konsolidasi lintas sektor.
- 4. Penentuan status keadaan darurat.
- 5. Melaksanakan pemulihan infrastruktur darurat.
- 6. Melakukan pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terdampak.
- 7. Memberikan pelayanan Medis Masyarakat Terdampak dan Korban termasuk perlindungan kelompok rentan (Lansia, Ibu Hamil, DII).
- 8. Melakukan pengamanan masyarakat terdampak dan aset masyarakat yang terdampak.
- 9. Melaksanakan pemulihan Ekonomi Dini.
- 10. Memberikan pendampingan Masyarakat Adat.
- 11. Memberikan pendampingan penanganan pertama psikologi dan dukungan psikososial.
- 12. Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19 bagi penyintas dan pelaksana penanganan darurat bencana tanah longsor.
- 13. Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana.

ii. Fungsi Sistem Komando.

Fungsi Sistem Komando dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari **BAB III: PELAKSANAAN** dan merupakan Sub-Bab **3.2. Fungsi dan Tugas-tugas**

Pernyataan fungsi-fungsi sistem komando pada rencana kontingensi merujuk pada lima fungsi dasar seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

Fungsi-fungsi ini merupakan panduan oleh pelaksana operasi penanganan darurat bencana dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana.

Fungsi-fungsi pada sistem komando ini merupakan Sub Bab 3.2 pada Bab III dokumen rencana kontingensi.

Contoh pernyataan fungsi-fungsi pada sistem komando penanganan darurat bencana:

Pada tahap/fase saat terjadi bencana/tanggap darurat, pada hari "H" jam "J", Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir disaat pandemik Covid-19 Kab. Posing Barat menjalankan fungsi-fungsi sbb:

- 1) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi
 - a) Menentukan tujuan dan strategi PDB dengan memastikan adanya kesatuan komando, upaya terpadu serta interoperabilitas antar pihak-pihak terkait.
 - b) Koordinasi multi-pihak yang terlibat dalam operasi PDB.
 - c) Manajemen/pengelolaan komunikasi dan informasi yang terpadu.
- 2) Perencanaan

Memastikan adanya proses perencanaan yang terpadu, berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan.

- 3) Operasi
 - Operasi dukungan yang terpadu untuk mencapai tujuan/sasaran, dengan strategi yang telah ditentukan dan melibatkan sumberdaya multi-pihak secara efektif dan efisien
 - Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana
- 4) Logistik

Memastikan dukungan logistik (fasilitas, peralatan, sumberdaya, sarana transportasi dan komunikasi, layanan medis, dsb) yang diperlukan untuk kelancaran operasi PDB tersedia sesuai kebutuhan.

5) Administrasi & Keuangan

Memastikan dukungan untuk hal-hal yang terkait administrasi dan keuangan untuk mendukung kelancaran operasi PDB, termasuk pertanggungjawaban administrasi yang akuntabel dan transparan.

iii. Tugas-tugas Pada Sistem Komando.

Tugas-tugas Pada Sistem Komando dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari BAB III: PELAKSANAAN dan merupakan Sub-Bab 3.2. Fungsi dan Tugas-tugas

Fungsi-fungsi komando yang telah ditentukan sebelumnya harus dijabarkan tugas-tugasnya agar rencana kontingensi yang dibuat dapat dilaksa nakan. Tugas-tugas ini harus dipastikan dapat dicapai oleh pelaksana penanganan darurat bencana.

Tugas-tugas ini merupakan Sub Bab 3.3 pada Bab III dokumen rencana kontingensi.

Contoh tugas-tugas pada sistem komando yang diturunkan dari fungsi-fungsi pada sistem komando:

Pada tahap/fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana banjir disaat pandemik Covid-19, pada hari "H" jam "J" WIB, Komando PDB Kab. Posing Barat menjalankan tugas-tugas yang mencakup:

- 1. Komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi
 - a) Komandan
 - Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Posko Komando Tanggap Darurat PDB Kabupaten Posing Barat, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
 - Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana PDB Kabupaten Posing Barat.
 - Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
 - Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

b) Sekretariat

- Menyelenggarakan administrasi umum (non keuangan) dan pelaporan.
- c) Keamanan, Keselamatan dan Adat
 - Menyiapkan personil dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan bencana.
 - Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana dalam menjalankan tugasnya.
 - Mengamankan lokasi bencana dan mengarahkan ke tempat berkumpul.
 - Mengantisipasi tentang terjadinya kejahatan.
 - Memastikan protokol-protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dilaksanakan dengan baik.
 - Mengatur kendaraan untuk memudahkan lalu lintas.
 - Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan suatu keadaan yang berbahaya.
 - Mengindahkan nilai-nilai adat yang ada di Kabupaten Posing Barat.
 - Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

d) Penghubung

- Menghubungkan posko dengan
- Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- Menyambungkan komunikasi antar bidang dan seksi secara cepat dan tepat

2. Sumberdaya

 Menyiapkan, mengatur/mengelola, membagi sumber daya yang ada maupun yang di perlukan untuk kemudahan penanganan darurat bencana (SDM, peralatan, logistik, transportasi dll).

3. Kajian Situasi

- Menyusun rencana aksi (harian hingga selesai masa tanggap) berkoordinasi dengan komando untuk menentukan aksi
- Mencari informasi kondisi cuaca terkini dan Covid-19 dan melaporkan update cuaca dan Covid-19 kepada tim, sebagai bahan pertimbangan aksi
- Membuat update informasi terkait kondisi kejadian bencana banjir yang terjadi dan Covid-19serta selanjutnya membuat laporan terkait kondisi terkini kejadian banjir dan Covid-19.
- Membuat laporan harian terkait kondisi kejadian bencana seperti jumlah korban, kasus Covid-19 positif di wilayah bencana dan pengungsian, jumlah kerusakan dan wilayah terdampak
- Membuat dan menyediakan data dan informasi dalam bentuk display-display dan peta-peta
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana dengan memastikan terdapatnya data terkait kesetaraan jender dan inklusifitas.

4. Penyelamatan dan Pertolongan dan Evakuasi

- Memastikan tim menggunakan APD yang aman dari penularan Covid-19 sesuai protokol kementerian kesehatan RI.
- Melakukan assessment masyarakat yang terkena dampak bencana (penilaian dini, penialian situasi, penilaian keadaan).
- Memberikan pertolongan pertama (Triase).
- Melakukan evakuasi (penyelamatan penduduk, evakuasi korban).
- Pemulihan hubungan keluarga (penyatuan keluarga yang terpisah).
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

5. Penanganan Pengungsi dan perlindungan kelompok rentan

- Melakukan assesment (pendataan) pengungsi dan kelompok rentan serta verivikasi dan pemutakhiran data berkala.
- Melakukan distribusi bantuan (sandang pangan).
- Menyiapkan dapur umum.
- Menyiapkan penampungan darurat (titik-titik pengungsian).
- Memberikan pelayanan air dan sanitasi termasuk MCK .
- Melakukan pengelolaan, manajemen pengungsian di setiap titik-titik pengungsian.
- Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19.
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

6. Kesehatan

- Memberikan pelayanan Kesehatan dan pelayanan ambulans.
- Melakukan pemetaan area bencana (bersama RHA / rapid healt assesmen).
- Menugaskan tim rapid health respon (tim gerak cepat) bidang kesehatan.
- Memberikan pelayanan rujukan.
- Memberikan pelayanan psikososial.
- Memberikan pelayanan sanitarian (sanitasi dasar).
- Melakukan pembasmian hama di lokasi bencana.
- Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- Memberikan pelayanan pengobatan.
- Melakukan upaya pencegahan penularan Covid-19.
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

7. Pencegahan Covid-19

- Pencegahan:
 - Melakukan surveilens epidemiologi.
 - Melaksanakan edukasi kepada masyarakat, pelaksana penanganan darurat bencana dan relawan.
 - Melakukan sosialisasi PHBS dan pencegahan penularan Covid-19.
 - Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana
- Penanganan:
 - Melaksanakan deteksi (rapid test & Swab Test) dan penelusuran penderita Covid-19.
 - Melaksanakan perawatan terhadap OTG, ODP dan positif Covid-19.
 - Melaksanakan pengobatan pada penderita positif Covid-19.
 - Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

8. Pemulihan Darurat

- Melakukan normalisasi sungai (membersihkan sungai dan longsoran)
- Membuka akses jalan yang tertutup, membersihkan jalan, jalur akses jalan alterrnatif, jalan sementara
- Membangun jembatan sementara untuk jembatan rusak
- Menyiapkan tempat tinggal sementara untuk pengungsi/ tenda

- Menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan sementara
- Menyiapkan MCK sementara
- Menyiapkan penampungan air bersih untuk kebutuhan sementara
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana
- Menyiapkan genset yang memadai untuk suplai listrik
- Mendirikan sarana ibadah sementara/Tenda
- Melakukan perbaikan sarana pendidikan sementara/ membangung tenda untuk kegiatan belajar mengajar
- Menmberikan bantuan alat berat seperti excavator, truck, dsb.
- Menyiapkan posko dan faslilitas-fasilitas pendukung

9. Pemulihan Ekonomi

- Memberikan dana stimulant untuk pemodalan awal (uang, benih, pupuk dan bibit ternak) pada masyarakat terdampak
- Pengembalian fungsi pasar
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

10. Pendampingan psikososial dan Pendidikan

- Psycho Sosial Support (PSP)
- Memfasilitasi pendampingan kelompok rentan
- Memberikan pendampingan keagamaan
- Memfasilitasi ruang ramah anak
- Menyediakan perlengkapan sekolah dan sarana bermain
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana

11. Transportasi

- Mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan bidang operasi untuk memastikan kebutuhan transportasi
- Menyiagakan dan mengerahkan seluruh potensi sumberdaya transportasi yang ada baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat
- Mengkoordinasikan sumberdaya transportasi untuk merapat/mendekati titik-titik strategis (titik kumpul, titik pengungsian, POSKO PDB, dsb) yang memerlukan moda transportasi
- Mengerahkan sumberdaya transportasi untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan

- darurat bencana
- Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari/ke lokasi kejadian bencana untuk mendukung seluruh kebutuhan operasional penanganan darurat bencana
- Bertanggung jawab langsung kepada Kepala unit logistik.
- Mengarusutamakan kesetaraan jender dan inklusifitas dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana sub-bidang transportasi

12. Komunikasi

- Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
- Memastikan alur komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
- Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.

13. Sarana dan Prasarana

Membuat Pos sekretariat, Merencanakan kebutuhan barang, membuat suatu penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian.

14. Pangan

Merencanakan dan mendata kebutuhan, membuat suatu penganggaran, melakukan suatu menajemen penyimpanan dan penyaluran, pengendalian. Membuat dapur khusus untuk semua tim penyelamat.

15. Supply dan Pergudangan

- Menyiapkan dan merancang kebutuhan makanan dll untuk korban bencana, membuat suatu menajemen penyimpanan penyaluran makanan dll, pengendalian.
- Membuat tenda pergudangan, membuat suatu manajemen dokumen stok barang masuk dan barang keluar, serta membuat lampiran ketersediaan barang, melakukan koordinasi dan pengendalian.

16. Administrasi dan Keuangan

- Mengarsip setiap data da n dokumen dari hal terkecil sampai besar
- Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan, menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan, menyiapkan bahan pengkkordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan, menyiapkan bahan pementauan, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan.

vi. Instruksi & Koordinasi Pada Sistem Komando.

Instruksi & Koordinasi Pada Sistem Komando dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari BAB III: PELAKSANAAN dan merupakan Sub-Bab 3.3. Instruksi dan Koordinasi

Pernyataan instruksi & koordinasi dinarasikan dalam rencana kontingensi yang berguna untuk komandan penanganan darurat bencana dalam melakukan tindakan segera dan rutin dalam upaya penanganan darurat bencana.

Instruksi & Koordinasi ini merupakan Sub Bab 3.3 pada Bab III dokumen rencana kontingensi.

Contoh pernyataan instruksi & koordinasi pada sistem komando penanganan darurat bencana:

- 1. Lakukan Operasi penanganan darurat bencana sesuai dengan SOP yang telah disepakati dalam rencana kontijensi.
- 2. Pastikan upaya pencegahan penularan Covid-19 dilaksanakan oleh semua pihak sesuai Protokol-protokol Kesehatan yang telah ditentukan.
- 3. Buat usulan Instruksi atau Peraturan Bupati melalui BPBD terkait Tanggap Darurat dilakukan dan atau diakhiri.
- 4. Tentukan siapa yang memegang kendali sistem Komando (Komandan Posko) Satuan kerja penanganan darurat bencana.
- 5. Lakukan Rapat Koordinasi awal dan pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku penanggulangan bencana.
- 6. Pastikan pengarusutamaan kesetaraan jender dan inklusifitas diperhatikan dan dilaksanakan dalam tiap tindakan penanganan darurat bencana
- 7. Laksanakan Koordinasi dengan masyarakat adat setempat terkait pendirian Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian serta hal-hal lain yang terkait penanggulangan bencana.
- 8. Dirikan Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian.
- 9. Lakukan tinjauan langsung (Posko, Pos Lapangan dan Lokasi Pengungsian).
- 10. Lakukan Monitoring Evaluasi dilakukan oleh pemangku kepentingan, komandan posko dan perwakilan Komandan pos lapangan.
- 11. Lakukan Rapat-rapat Koordinasi dan Evaluasi secara berkala (Posko dan Pos Lapangan).
- 12. Laporkan perkembangan secara berkala.

d. Administrasi, Keuangan & Logistik.

Administrasi, Keuangan & Logistik dalam dokumen rencana kontingensi adalah BAB IV: ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Panduan umum penatalaksanaan administrasi, keuangan & logistik pada penanganan darurat bencana dicantumkan dalam rencana kontingensi agar pelaksana administrasi, keuangan & logistik memiliki rambu-rambu dalam pelaksanaan tugasnya.

Administrasi, Keuangan & Logistik ini merupakan Bab IV pada dokumen rencana kontingensi.

Contoh-contoh pernyataan Administrasi, Keuangan & Logistik dalam rencana kontingensi:

Administrasi & Keuangan

Administrasi& Keuangan dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari BAB IV: ADMINISTRASI DAN LOGISTIK dan merupakan Sub-Bab 4.1. Administrasi

- Pada awal kejadian banjir dan longsor atau sebelum sistem komando penanganan darurat bencana di aktifkan maka seluruh sumberdaya lokal kab Teluk Bintuni di optimalkan dimana dana kegiatan berasal dari setiap OPD atau lembaga terkait yang mempunyai anggaran penanggulangan bencana.
- Setelah di tetapkannya pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Bupati dan sistem Komando
 Penannganan Darurat Bencana diaktifkan maka kegiatan operasi darurat menggunakan BANSOS yang bersumber dari APBD.
- Apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi Kabupaten Teluk Bintuni maka Pemda Teluk Bintuni meminta dukungan dari Provinsi Papua Barat (BTT), dan Pusat (DSP)
- Pemerinah provinsi hadir untuk memberikan dukungan (pendampingan teknis, BTT dan bantuan lain yang diperlukan Kabupaten Teluk Bintuni.
- Pemerintah pusat merapat dan memberikan pendampingan dan bantuan yang sifatnya ekstrim berupa sumberdaya yang tidak dimikili dan tidak bisa diberikan oleh daerah Kabupaten Teluk Bintuni; jenis pendampingan yang diberukan mencakup; kebijakan dan arahan strategis, pendampingan teknis berupa personil, data dan informasi pendampingan akses Dana Siap Pakai (DSP) pendampingan akses dana bencana Kabupaten Teluk Bintuni, administrasi untuk pelaksanaan yang akuntabel.

Logistik

Logistik dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian dari BAB IV: ADMINISTRASI DAN LOGISTIK dan merupakan Sub-Bab 4.2. Logistik

- Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya local (SDM,peralatan,transportasi,pangan, dll) dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha dan juga masyarakat
- Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat meminta bantuan pada pemerintah kabupaten terdekat seperti; Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong. Dan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dan pemerintah pusat terkait fasilitas personil,dana siap pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT),Pendampingan logistic dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi kabupaten teluk bintuni.

e. Komando, Kendali & Koordinasi.

Komando, Kendali & Koordinasi dalam dokumen rencana kontingensi adalah BAB V: KOMANDO, KENDALI & KOORDINASI

Komando, kendali & koordinasi merupakan rantai pelaksanaan penanganan darurat bencana yang harus dijaga dan tak boleh terputus guna mencapai tujuan penanganan darurat bencana. Dalam rencana kontingensi ketiga hal ini harus dinarasikan setelah kesepakatan dalam proses penyusunan rencana kontingensi diambil.

Komando, Kendali & Koordinasi ini merupakan Bab V pada dokumen rencana kontingensi.

Contoh pernyataan komando, kendali & koordinasi dalam rencana kontingensi:

A. KOMANDO

- Komando Utama selama operasi berada di Kantor Setda Kabupaten Klendali sebagai Pos Komando (POSKO)
- 2. Komando Operasional selama operasi berada di Kantor Kecamatan terdampak sebagai Pos Lapangan (POSLAP)
- 3. Komando Taktis selama operasi berada di Kantor Balai Desa atau Kelurahan terdampak sebagai Pos Pendukung Lapangan (POSDUKLAP)

B. KENDALI

Kendali operasi dijabat Dandim 071515/Klendali atau Kapolres Klendali atau Sekda Kabupaten Klendali sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana.

- 1. Selama operasi berada di area terdampak bencana.
- 2. Kendali taktis berada di Pos Lapangan.

C. KOMUNIKASI

Komunikasi menggunakan radio, telephone, hp, surat, email

L. Radio:

Frekuensi utama radio selama operasi:

157.160 MHz RX (BPBD)

157.160 MHz RX (BPBD)

154.075 MHz TX (BPBD)

154.075 MHz TX (BPBD)

88.5 tone

Frekuensi cadangan⁵⁴:

147.020 MHz RX (ORARI)

147.020 MHz RX (ORARI)

147.620 MHz TX (ORARI)

147.620 MHz TX (ORARI)

142.340 MHz RX (RAPI)

142.340 MHz RX (RAPI)

140.150 MHz TX (RAPI)

140.150 MHz TX (RAPI)

2. Telepon : Nomor kantor setda yang digunakan sebagai posko

3. E mail : BPBD

4. Faxsimile no: Nomor kantor setda yang digunakan sebagai posko

⁵⁴ Berdasarkan pengalaman organisasi RAPI dan ORARI sangat membantu dalam kehgiatan penyusunan rencana kontingensi dan respon bencana disaat terjadinya bencana. Namun begitu, terdapat pula organisasi massa lain yang kerap mendukung komunikasi karena sesuai dengan tupoksi mereka, yaitu Pokdarkamtibmas dan Senkom Mitra Polri, oleh karena itu pelibatan mereka dalam penyusunan rencana kontingensi merupakan hal yang baik.

Bab

Lampiran-lampiran Pada Dokumen Rencana Kontingensi

Lampiran Pada Dokumen Rencana Kontingensi dalam dokumen rencana kontingensi adalah bagian **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran dalam rencana kontingensi yang harus disertakan adalah:

- 1. Lampiran-A: Struktur Organisasi dan Koordinasi Dengan Pos Pendamping
- 2. Lampiran-B: Susunan Tugas
- 3. Lampiran-C: Jaring Komunikasi
- 4. Lampiran-D: Peta-Peta
- 5. Lampiran-E: Sumberdaya yang digunakan
- 6. Lampiran-F: Prosedur Tetap/SOP
- 7. Lampiran-G: Lembar Komitmen
- 8. Lampiran-H: Berita Acara Penyusunan Renkon

Lampiran-lampiran ini tidak dapat dikurangi, namun dapat ditambahkan sesuai kebutuhan, misalnya penambahan *Lampiran: Protokol-protokol Pencegahan Covid-19*.